



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jl. Parit H. Husein 2 Komplek Alex Griya Permai III Blok F No. 1 Pontianak Tenggara
Pontianak - Kalimantan Barat
Telepon : (0561) 574579, Faksimili : (0561) 574578
Email : bnnpkalbar@gmail.com

BNNP KALBAR

Pontianak, 22 Januari 2025

Kepada
Yth. Sekretaris Utama BNN RI
c.q. Biro Perencanaan BNN RI
di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : SPeng/ 91 //KA/PR.03.02/2025/BNNP

No.	Isi	Banyaknya	Keterangan
1.	Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025.	1 (satu) Dokumen	

An. Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Bagian Umum


Tri Tjahyeno, S.Sos, M.Si





LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan Badan Narkotika Nasional selaku Penyelenggara Negara di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 yang meliputi kinerja, dengan 2 (dua) Program, 13 (tiga belas) Sasaran Kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2024, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan pelayanan yang prima dan cepat sebagai agenda Reformasi Birokrasi, juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 telah berhasil menyelesaikan berbagai kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang, Akhirnya saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan.

Menyadari hal tersebut, mudah-mudahan untuk tahun yang akan datang, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dapat disusun lebih baik dan memenuhi harapan semua pihak.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua. Amin.

Pontianak, Januari 2025
Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Kalimantan Barat




Drs. Sumirat Dwiyanto, M.Si
NRP. 67040501

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
EXECUTIVE SUMMARY	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN	3
D. STRUKTUR ORGANISASI	6
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. PERENCANAAN STRATEGIS	8
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	14
C. PERJANJIAN KINERJA BNNP KALIMANTAN BARAT TA. 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN	19
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	19
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	68
BAB IV PENUTUP	71

EXECUTIVE SUMMARY

Penetapan Kinerja BNNP Kalimantan Barat tahun 2024 menetapkan 13 (empat belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 18 (delapan belas) indikator. Dari 18 (delapan belas) indikator kegiatan tersebut dapat disimpulkan sebanyak 16 (enam belas) indikator berada pada kategori Sangat baik, 1 (satu) indikator berada pada kategori baik dan 2 (dua) indikator berada pada kategori Cukup.

Berikut ringkasan eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024.

1. Membahas mengenai perhitungan Indikator Kinerja Kegiatan, berikut penjabarannya:
 - a. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 3 Kabupaten / Kota dari target 6 Kabupaten / Kota, sehingga masuk dalam kategori **Cukup** dengan pencapaian sebesar 50%.
 - b. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 7 Kabupaten / Kota dan target 6 Kabupaten / Kota, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 116,67%.
 - c. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 7 Kabupaten / Kota dari target 7 Kabupaten / Kota, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" mencapai nilai 1 Kawasan dari target 1 Kawasan, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
 - e. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang diintervensi” mencapai nilai 2,60 dari target 2,44, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 106,57%.

- f. Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase penyalahguna dan/atau pecandunarkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup” mencapai nilai 88,79% dari target 59%, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 150,49%
- f. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih” mencapai nilai 80 petugas IBM dari target 80 petugas IBM, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
- g. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat” mencapai 1 lembaga rehabilitasi dengan target 2 lembaga rehabilitasi, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 200%.
- h. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat” mencapai 16 unit IBM dengan target 16 unit IBM, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
- i. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks kepuasan penerima layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat” mencapai 3,57 dengan target 3,06, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 116,66%.
- j. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21” mencapai 10 Berkas dari target 8 Berkas, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 125%.
- k. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan” mencapai nilai 100% dari target sebesar 100%, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
- l. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika” mencapai nilai 100% dari target sebesar 100%, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100%.
- m. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 98,10 dari target sebesar 80 sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 122,63%.
- n. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target” mencapai nilai 7 BNNK dari target sebesar 1 BNNK, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik**

dengan pencapaian sebesar 700%.

- o. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat” mencapai nilai 97,98 dari target sebesar 97,98 sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100,19%.
- p. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target” mencapai nilai 4 BNNK dari target sebesar 7 BNNK, sehingga masuk dalam kategori **Cukup** dengan pencapaian sebesar 57,14%.
- q. Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal mencapai target” mencapai nilai 75,05 dari target sebesar 75, sehingga masuk dalam kategori **Sangat Baik** dengan pencapaian sebesar 100,06%.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bagaikan fenomena jamur di musim penghujan. Banyaknya pengungkapan kasus baik penyelundupan, peredaran gelap maupun penyalahgunaan mencerminkan problematika yang menjadi kekhawatiran bersama.

Sepanjang tahun 2024 total pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 13 kasus. BNN Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran telah berhasil mengungkap 8 kasus tindak pidana narkoba dengan jumlah berkas perkara sebanyak 10 berkas perkara TPN (10 orang tersangka: 2 Warga Negara Malaysia) dimana 1 kasus diantaranya merupakan operasi gabungan dengan Kodam XII/Tanjungpura. Selain itu terdapat 5 kasus tindak pidana narkoba merupakan operasi gabungan dengan Kodam XII/Tanjungpura dan Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI dengan jumlah berkas perkara sebanyak 4 berkas perkara TPN (4 orang tersangka: 2 orang Warga Negara Malaysia). Dari 13 kasus yang berhasil diungkap diwilayah Kalimantan Barat, 3 diantaranya merupakan jaringan Malaysia.

Pada tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Barat beserta jajaran telah berhasil menyita barang bukti narkoba sebanyak 21.140,18 gram sabu, 21 butir ekstasi (7,64 gram) dan 18.891,72 gram ganja. Barang bukti lainnya adalah uang tunai sebesar Rp.1.850.000 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 157 RM (seratus lima puluh tujuh Ringgit Malaysia), 21 (dua puluh satu) buah handphone, 1 (satu) unit kendaraan roda empat, dan 5 (lima) unit kendaraan roda dua.

Kasus yang bersifat Internasional ditangani langsung oleh Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI. Jaringan Malaysia yang berhasil diamankan oleh BNNP Kalimantan Barat beserta Kodam XII/Tanjungpura dan Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI merupakan jaringan di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dari hasil pengungkapan jaringan ini BNNP Kalimantan Barat berhasil mengamankan 8 orang tersangka dengan barang bukti narkoba Sabu dengan berat brutto ± 26.860,2 gram, Pil Ekstasi 3.137,5 gram / 9.062 Butir, dan Happy Five 700 Butir. 8 orang tersangka ini

terjerat Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal pidana mati.

Dari 10 tersangka yang berhasil ditangani oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas laki-laki sebanyak 9 orang dari 10 orang tersangka yang berhasil diamankan oleh BNNP Kalbar (90%).
2. Berdasarkan karakteristik usia dibagi ke dalam kelompok usia dengan interval : 25 – 34 tahun sebanyak 5 orang (50%) merupakan kelompok usia mayoritas dari tersangka yang diamankan, 35 – 44 tahun sebanyak 4 orang (40%) dan 45 – 54 tahun sebanyak 1 orang (10%). Usia termuda dari tersangka yang diamankan adalah 26 tahun sedangkan untuk usia tertua adalah 45 tahun.
3. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, SD sebanyak 2 orang (20%), SMP sederajat sebanyak 3 orang (30%), SMA sederajat sebanyak 2 orang (20%), dan sebanyak 3 orang (30%) tidak mengenyam pendidikan. Tingkat pendidikan terendah dari tersangka yang diamankan adalah tidak mengenyam Pendidikan (tidak sekolah) sedangkan pendidikan tertinggi adalah SMA.
4. Barang Bukti Narkotika berupa Ganja berasal dari Medan dan Aceh yang dikirim ke Kota Pontianak melalui ekspedisi yang akan disebarkan/diperjual-belikan di wilayah Kota Pontianak dengan sasaran usia dewasa (18 tahun ke atas).
5. Karakteristik pekerjaan dibagi ke dalam kategori : buruh sebanyak 1 orang (10%), petani sebanyak 1 orang (10%), karyawan swasta sebanyak 6 orang (60%) merupakan kategori dengan jumlah tertinggi dari tersangka yang diamankan, wiraswasta sebanyak 1 orang (10%), dan ibu rumah tangga sebanyak 1 orang (10%).
6. Hal lain yang menarik adalah karakteristik tersangka berdasarkan perannya dalam melakukan aksi tindak pidana narkotika yang dibagi ke dalam kategori : pengedar sebanyak 6 orang (60%) dan kurir sebanyak 4 orang (40%).
7. Sedangkan status dari para tersangka tersebut adalah residivis sebanyak 2 orang (20%), dan pemain baru sebanyak 8 orang (80%).

Dengan munculnya banyak pemain baru yang sebagian besar perannya adalah kurir dan pengedar serta sebagian besar tanpa pekerjaan yang tetap menunjukkan bahwa faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup masih menjadi penyebab

utama terlibatnya mereka dalam bisnis narkoba.

BNN Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat bekerja sendiri dalam menuntaskan permasalahan narkoba yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, oleh sebab itu diperlukan kerjasama dari seluruh *stakeholder* yang ada serta partisipasi dari masyarakat. BNN Provinsi Kalimantan Barat dan jajaran telah berkolaborasi dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti:

1. Pengungkapan kasus tindak pidana narkoba bersama Kodam XII / Tanjungpura, Polda Kalimantan Barat (Dit Res Narkoba), Polresta Pontianak, Beacukai Pontianak (DJBC Kalbagbar), Imigrasi Kelas I Pontianak, Perusahaan Ekspedisi JNE Pontianak, Indah Logistik Cargo, serta partisipasi Masyarakat.
2. Sebagai anggota tim pengawasan orang asing (TIMPORA) dan Anggota Komite Keamanan Bandara
3. Membentuk satgas interdiksi di PLBN Entikong bersama BNN RI serta instansi terkait lainnya. Satgas interdiksi bertujuan untuk menekan angka penyelundupan narkoba yang masuk melalui jalur sungai, laut dan udara.

Berbagai strategi telah dilakukan dalam upaya menurunkan angka permintaan narkoba, salah satunya adalah dengan membentuk Tim Asesmen Terpadu (TAT). Pada tahun 2024 BNNP Kalbar beserta jajaran melaksanakan TAT sebanyak 58 klien. Hal ini terjadi peningkatan jumlah kasus narkoba yang masuk dalam proses assesmen jika dibandingkan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 55 klien. Tercatat klien TAT dengan usia termuda adalah 21 tahun sedangkan usia tertua adalah 40 tahun.

Kerawanan terhadap permasalahan narkoba di Kalimantan Barat juga dipengaruhi dengan kondisi geografis. Kalimantan Barat memiliki jalur perbatasan sepanjang ± 966 kilometer membentang dari kabupaten Sambas hingga Kabupaten Kapuas Hulu dengan melintasi 96 Desa dan 14 Kecamatan. Kondisi ini menjadi titik yang sering dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan transnasional ini. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (September 2020) berjumlah sekitar 5,41 juta jiwa, di mana 2,78 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 2,63 juta jiwa adalah perempuan. Kepadatan penduduk Kalimantan Barat sekitar 37 Jiwa per Km². *Sex ratio* (rasio jenis kelamin) di Kalimantan Barat sebesar 105,7. Hal ini berarti dalam 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki. Dengan jumlah penduduk yang begitu besar, postensi peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba sangat tinggi.

Dari sisi pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tak henti-hentinya berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar dapat bersama-sama menangani permasalahan ini. Dimulai dari pembentukan Tim Terpadu, pelaksanaan Inpres 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, hingga pembentukan Desa bersinar.

Sedangkan dari sisi penanganan korban penyalahgunaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan program Rehabilitasi Narkotika. Sebanyak 8 Klinik pratama disediakan di 7 Kabupaten / Kota untuk melayani klien rehabilitasi. Selain itu Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat juga telah membentuk Unit Intervensi Berbasis masyarakat. Sebanyak 18 unit IBM telah dibentuk di Kabupaten / Kota. Tujuan dibentuknya unit ini antara lain untuk mendekatkan layanan rehabilitasi pada penerima layanan dan mengantisipasi stigma buruk masyarakat, bahwa pecandu akan dipenjara.

Berdasarkan beberapa hal tersebut diatas, maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengemban tanggung jawab program P4GN di wilayah Kalimantan Barat telah merencanakan dan melaksanakan beberapa kegiatan untuk mengatasi permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya dalam laporan ini akan dibahas mengenai bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat merencanakan kegiatan untuk menangani permasalahan narkotika dan bagaimana hasil kinerja dari perencanaan dan pelaksanaan tersebut.

B. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
8. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BNN.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

1. KEDUDUKAN

Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat adalah Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Kalimantan Barat.

2. TUGAS

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional di Kalimantan Barat mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral di daerah guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;
- h. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- i. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
- b. Penyusunan Perencanaan, program dan anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat;
- c. Penyusunan dan Perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;
- d. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan.
- e. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan bidang P4GN di Daerah;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat di daerah;
- h. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba di Daerah;
- i. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;
- j. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan / atau

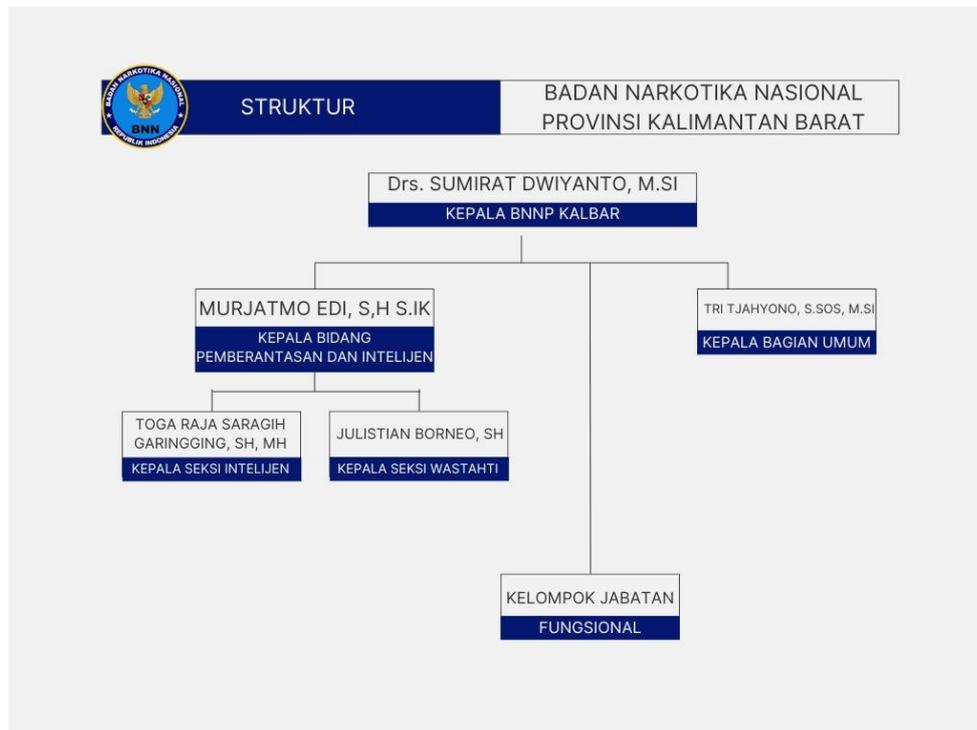
- pecandu Narkoba;
- k. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
 - l. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya;
 - m. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;
 - n. Pelaksanaan kerja sama regional di bidang P4GN;
 - o. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat;
 - p. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
 - q. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
 - r. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang P4GN di Daerah.

4. KEWENANGAN

Kewenangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh Undang – Undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan di daerah.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di Bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan Strategis dan Perjanjian Kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas Rencana Program Kerja (Renproja) 2020 – 2024, Rencana Kerja Tahunan 2024 dan Penetapan Kinerja tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024, dengan uraian kegiatan yang dilakukan berdasarkan penetapan kinerja dan Pengukuran Kinerja

BAB IV PENUTUP

BAB V LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak – banayaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas program agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Dalam penyusunan Visi dan Misi Tahun 2020-2024, BNNP Kalimantan Barat mengacu pada visi dan misi BNN RI yang memperdomani visi dan misi Presiden RI 2020 – 2024. Adapun visi BNN RI adalah sebagai berikut : “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dengan kata lain turunan Visi yang diemban BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Untuk mewujudkan visi tersebut BNN Provinsi Kalimantan Barat menetapkan misi sebagai berikut:

1. Memberantas peredaran gelap dan mencegah Penyalagunaan Narkoba secara Profesional;
2. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan narkoba;
3. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan visi dan misi Presiden RI 2020-2024 yang diterjemahkan melalui kaca mata organisasi BNN, maka dapat ditarik titik simpul bahwa core value

dari organisasi BNN adalah pada kekuatan perlindungan dan penyelamatan masyarakat. Di sisi lain, tindak intervensi yang menjadi mandat dan fungsi konstitusional BNN adalah tindak pencegahan dan pemberantasan. Konstruksi relasional dan substantif dari nilai organisasi dan fungsi organisasi mengarahkan pada tujuan BNN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Tujuan

a. Tujuan 1

“Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”

Tujuan pertama didasarkan pada pertimbangan bahwa hal atau kondisi akhir yang ingin diwujudkan oleh BNN secara institusional adalah terwujudnya masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba. Ketahanan masyarakat harus terus meningkat atau masyarakat harus memiliki daya tolak dan daya tangkal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan pilihan penting untuk menekan sisi demand dari penyalahgunaan narkoba yang pada gilirannya diharapkan mampu secara efektif mengurangi sisi supply dari peredaran narkoba. Selain itu integrasi tindakan pencegahan dan pemberantasan sangat strategis untuk terus dilakukan dalam rangka melemahkan pasar, terutama dari sisi supply, melalui tindak penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti berikut aset pelaku kejahatan peredaran narkoba. Demikian pula, tindak pencegahan dan pemberantasan juga merupakan bagian integral yang penting dalam penegakkan hukum. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Angka Prevalensi penyalahgunaan narkoba.

b. Tujuan 2

“Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas”

Tujuan kedua merepresentasikan kinerja kelembagaan yang harus berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan titik-titik transformasi yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

2. Sasaran Strategis

a. Sasaran Strategis 1

“Meningkatnya Penanganan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”
Aktivitas BNN dalam upaya menurunkan penyalahgunaan dan mengendalikan peredaran gelap dilaksanakan melalui intervensi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Ketercapaian sasaran ini diindikasikan dengan Indeks P4GN. Indeks tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan secara holistik dan terintegratif baik melalui upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan. Upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dilaksanakan melalui beberapa langkah diantaranya penangkalan dini masuknya narkoba dari luar wilayah Indonesia, penindakan aktivitas jaringan sindikat narkoba. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan ketahanan masyarakat dan rehabilitasi.

b. Sasaran Strategis 2

“Terwujudnya Manajemen Organisasi yang Profesional, Produktif, dan Proporsional serta Berkinerja Tinggi”

Untuk mendukung aktivitas inti BNN dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi yang baik, diperlukan sasaran kinerja kelembagaan yang berorientasi pada integrasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Manajemen organisasi yang profesional memberikan dasar yang kokoh bagi setiap struktur birokrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan kinerja yang produktif dan tinggi. Penataan resources dan arsitektur kinerja yang proporsional juga berpartisipasi terhadap kinerja yang efektif dan efisien. Ketercapaian sasaran ini diukur dengan Indeks Reformasi Birokrasi.

3. Target Kinerja

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi dan misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional yang telah dipaparkan pada

bab sebelumnya, maka disusun target kinerja dan kerangka pendanaan sebagai salah satu instrumen untuk mencapai visi dan misi Badan Narkotika Nasional.

Target kinerja merupakan penilaian dari pencapaian program yang diukur secara berkala dan dievaluasi pada akhir tahun 2024. Sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024.

Program Dukungan Manajemen Teknis

Sasaran yang hendak dicapai melalui program dukungan manajemen teknis adalah meningkatnya tata kelola organisasi yang profesional, dengan indikator program adalah :

- a. Nilai Kinerja Anggaran = baik
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran = baik

Untuk mencapai target kinerja tersebut, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN dengan indikator kegiatan adalah nilai kinerja anggaran dengan kategori “baik”
- 2) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dengan indikator kegiatan adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan kategori “baik”

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Indikator program P4GN adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jaringan diungkap
- b. Persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkotika
- c. Indeks ketahanan diri dan keluarga
- d. Indeks kota tanggap
- e. Indeks kemandirian masyarakat
- f. Jumlah fasilitas rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar

Program P4GN dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu pemberantasan, pencegahan, dayamas, hukum dan kerjasama, dan rehabilitasi. Indikator program P4GN disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada dalam program P4GN, yaitu:

1) Pemberantasan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pemberantasan adalah jumlah jaringan diungkap sebanyak dengan besar target jaringan dan persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkoba sebesar. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Intelijen Berbasis Teknologi dengan indikator kegiatan adalah jumlah jaringan yang berhasil dipetakan dengan besar target berturut-turut selama 5 tahun 2, 1, 1, 1, dan 1 peta jaringan.
- Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkoba dengan indikator kegiatan adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21 dengan besar target berturut-turut 16, 16, 16, 16, dan 16 kasus.
- Kegiatan Penyidikan TPPU dengan indikator kegiatan, jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 dengan besar target berturut-turut 1, 1, 1, 1, dan 1 berkas perkara.
- Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti dengan dua indikator kegiatan, pertama nilai tingkat keamanan, ketertiban & kesehatan tahanan dengan besar target 100% per tahun dan kedua nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba & non narkoba dengan besar target 100% per tahun.

2) Pencegahan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pencegahan adalah indeks ketahanan diri remaja dan indeks ketahanan keluarga dengan besar target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Anak dan Remaja dengan dengan indeks ketahanan diri dengan besar target berturut-turut 50,03, 51, 52, 53, 53,51 dan 54.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Dewasa dan Keluarga dengan indikator kegiatan indeks ketahanan keluarga, dengan besar target berturut-turut naik 0,01 poin dari data baseline tahun 2020.

3) Dayamas

Indikator program dayamas adalah kota tanggap darurat, dengan besar target 7 kabupaten/kota yang teridentifikasi sangat tanggap narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Advokasi dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator kegiatan adalah indeks kemandirian masyarakat, dengan besar target berturut-turut 3,1; 3,15; 3,2; 3,25; dan 3,9
- Kegiatan Pemberdayaan Alternatif dengan indikator kegiatan status keterpulihan kawasan rawan dari “bahaya” menjadi “waspada”, dengan besar target berturut-turut 1, 1, 1, 1, 1 kawasan waspada.

4) Rehabilitasi

Indikator program rehabilitasi adalah pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang memenuhi SPM dengan besar target dan kedua persentase rehab pulih sebesar. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan (penguatan) fasilitas rehabilitasi. Dengan indikator kegiatan pertama, jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar dengan besar target berturut-turut n/a, 4, 6, 8, dan 8 lembaga, kedua jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat dengan besar target berturut-turut n/a, 8, 8, 8, 8 dan 16 unit.
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Ketenagaan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan jumlah petugas lembaga rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis layanan rehabilitasi dengan besar target berturut-turut n/a, 5, 5, 5, 5 dan 10 orang dan jumlah petugas unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan besar target 25, 25, 25, 25, dan 25 orang,
- Kegiatan Pengembangan Layanan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan indeks mutu layanan rehabilitasi dengan besar target naik 5% tiap tahunnya dari baseline tahun 2020

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagaimana telah dijabarkan pada Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 – 2024, maka ditetapkanlah target tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan 2024. Adapun perencanaan strategis BNN Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2024 antara lain:

Program Dukungan Manajemen Teknis

Target kinerja BNN Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN dengan indikator kegiatan adalah nilai kinerja anggaran dengan kategori “baik” (NKA sebesar 80 dan Jumlah BNNK yang mencapai target 1 BNNK)
- 2) Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan dengan indikator kegiatan adalah Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan kategori “Sangat baik” (IKPA sebesar 97,79 dan Jumlah BNNK yang mencapai target 7 BNNK)

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Indikator program P4GN adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah jaringan diungkap
- b. Persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkotika
- c. Indeks ketahanan diri dan keluarga
- d. Indeks kota tanggap
- e. Indeks kemandirian masyarakat
- f. Jumlah fasilitas rehabilitasi narkotika yang memenuhi standar

Program P4GN dibagi menjadi beberapa bidang, yaitu pemberantasan, pencegahan, dayamas, hukum dan kerjasama, dan rehabilitasi. Indikator program P4GN disesuaikan dengan bidang-bidang yang ada dalam program P4GN, yaitu:

- 1) Pemberantasan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pemberantasan adalah jumlah jaringan diungkap sebanyak, dengan besar target jaringan dan persentase penyelesaian aset TPPU tersangka narkotika sebesar. Untuk mencapai indikator kinerja program tersebut, dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Intelijen Berbasis Teknologi dengan indikator kegiatan adalah jumlah jaringan yang berhasil dipetakan dengan besar target 1 peta jaringan.
- Kegiatan Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika dengan indikator kegiatan adalah jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 dengan besar target 8 Berkas Perkara.
- Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti dengan dua indikator kegiatan, pertama nilai tingkat keamanan, ketertiban & kesehatan tahanan dengan besar target 100% dan kedua nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika & non narkotika dengan besar target 100%.

2) Pencegahan

Indikator kinerja dalam program P4GN bidang pemberantasan adalah indeks ketahanan diri remaja dan indeks ketahanan keluarga dengan besar target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan indikator kegiatan jumlah kabupaten / kota dengan indeks ketahanan diri remaja kategori tinggi sebanyak 6 Kabupaten / Kota.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi dengan indikator kegiatan jumlah kabupaten / kota dengan indeks ketahanan keluarga kategori tinggi sebanyak 6 Kabupaten / Kota.

3) Dayamas

Indikator program dayamas adalah kota tanggap darurat, dengan besar target 7 kabupaten/kota yang teridentifikasi sangat tanggap narkoba. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan beberapa kegiatan diantaranya adalah:

- Kegiatan Advokasi dan Peran Serta Masyarakat dengan indikator kegiatan adalah Kabupaten/Kota dengan nilai indeks kemandirian masyarakat kategori tinggi, dengan besar target 7 Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pemberdayaan ALternatif dengan indikator kegiatan status keterpulihan Kawasan rawan dari “waspada” menjadai “siaga”, dengan besar target 1 kawasan waspada dan indikator kegiatan Nilai Indeks

Keterpulihan Kawasan Rawan, dengan besar target 2,44.

4) Rehabilitasi

Indikator program rehabilitasi adalah pertama, jumlah fasilitas rehabilitasi narkoba yang memenuhi SPM dengan besar target dan kedua persentase rehab pulih sebesar. Untuk mencapai hal tersebut, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pengembangan (penguatan) fasilitas rehabilitasi. Dengan indikator kegiatan pertama, jumlah lembaga rehabilitasi yang sudah memenuhi standar dengan besar target 1 lembaga, kedua jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi berbasis masyarakat dengan besar target berturut-turut 16 unit.
- Kegiatan Peningkatan Kemampuan Ketenagaan Rehabilitasi dengan indikator jumlah petugas unit penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan besar target 80 orang.
- Kegiatan Pengembangan Layanan Rehabilitasi dengan indikator kegiatan indeks kepuasan penerima layanan Rehabilitasi pada fasilitas Rehabilitasi BNN rehabilitasi dengan besar target 3,06.

C. PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan suatu unit/organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Adapun Penetapan Kinerja/Perjanjian Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Satuan Kerja : Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	6	Kabupaten /Kota
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	6	Kabupaten / Kota
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	7	Kabupaten / Kota
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	Kawasan
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2,44	IKKR
Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	59	%
Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	80	Petugas Rehabilitasi
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	1	Lembaga Rehabilitasi
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	16	IBM

Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat	3,06	Indeks Kepuasan
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana dan prekursor narkotika yang P-21	8	Berkas Perkara
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan Tahanan	100	%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	%
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat	80	Nilai Kinerja Anggaran
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	1	BNNK
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat	97,79	IKPA
	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target	7	BNNK
Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	75	Indeks

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN

A. Analisis Capaian Sasaran

Penetapan Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 menetapkan 20 (dua belas) indikator kinerja kegiatan. Dari 18 (delapan belas) indikator kegiatan tersebut terdiri dari 16 (enam belas) indikator pada kategori sangat baik, dan 2 (dua) indikator cukup. Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian sasaran strategis tahun 2024, serta penjelasan hasil capaian 18 (delapan puluh) indikator kinerja kegiatan, yang diuraikan sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	6	3	50%
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	6	7	116,67%
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	7	7	100%
Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1	1	100%
	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan yang Diintervensi	2,44	2,60	106,56%

Meningkatnya kapasitas tenaga Teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	80	80	100%
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	1	2	200%
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	16	18	112,5%
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat	3,06	3,57	166,66%
Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berhasil dipetakan	1	1	100%
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	8	10	125%
Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	100	100	100%
	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100	100	100%
Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat	80	98,10	122,63%
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran	1	7	700%

	mencapai target			
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat (IKPA)	97,79	97,98	100,19%
	Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target	7	4	57,14%
Meningkatnya Pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	75	75.05	100,06%

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNNP Kalimantan Barat selama kurun waktu tahun 2024, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

1

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah Kabupaten/Kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori Tinggi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat

TARGET :
6
Kab / Kota

PENCAPAIAN :
3
50%

1.1

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi

adalah jumlah kabupaten/kota yang penduduk usia remajanya memiliki kemampuan individu untuk mengendalikan diri, menghindari dan menolak segala bentuk penyalahgunaan Narkoba.

Metode pengukuran jumlah institusi/lembaga yang responsif terhadap kebijakan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. Kriteria indeks ketahanan diri remaja berkategori “Tinggi” dengan melakukan pengujian dan pengukuran menggunakan Alat Ukur Ketahanan Diri Anti Narkoba (Anti Drugs Scale/ADS) dengan skala pengukuran yaitu :Self Regulation : kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
 - b.1. Self Regulation: kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi dan pengaruh lingkungan terhadap diri;
 - b.2. Assertiveness: kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas;
 - b.3. Reaching Out: kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.
- c. Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan dengan tabel sebagai berikut :

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba	
Klasifikasi	Interval ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat Rendah	≤ 45,97
Rendah	45,98 – 49,73
Tinggi	48,74 – 53,50
Sangat Tinggi	≥ 53,51

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 6 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 3 kabupaten/kota atau sebesar 50%. Adapun daftar pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ialah sebagai berikut:

No	Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Ketahanan Diri Remaja	Kategori
1.	Kota Pontianak	55,79	Sangat Tinggi

2.	Kota Singkawang	53,51	Sangat Tinggi
3.	Kabupaten Mempawah	48,81	Rendah
4.	Kabupaten Sanggau	45,00	Rendah
5.	Kabupaten Bengkayang	52,02	Tinggi
6.	Kabupaten Sintang	39,87	Sangat Rendah
7.	Kabupaten Kubu Raya	48,70	Rendah

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (3/6) * 100\%$ $= 50\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Jumlah Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" Di wilayah provinsi	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (3/5) * 100\%$ $= 60\%$	$\sum \text{JTA} = \text{Jumlah Realisasi Tahun Anggaran ini}$ $\sum \text{JM} = \text{Target Jangka Menengah}$

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Tersedianya anggaran pelaksanaan intervensi terhadap remaja pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang berada di wilayah Kalimantan Barat yaitu Program dialog remaja teman sebaya.
2. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional

Provinsi Kalimantan Barat secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada jajaran dalam mencapai nilai indeks ketahanan diri remaja.

3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait di wilayah kerja 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menjadi sasaran.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tidak ditemukan kendala yang berarti dalam pencapaian target kinerja.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindari ego sektoral.

2

Sasaran : Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi Kalimantan Barat

TARGET :
6
Kab / Kota

PENCAPAIAN :
7
116,67%

2.1

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi adalah kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal di

suatu kabupaten/kota. Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. Menghitung jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi;
- b. Kriteria indeks ketahanan keluarga berkategori “Tinggi” dengan melakukan perhitungan indeks ketahanan keluarga menggunakan instrument SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure). Setiap BNNP dan BNN Kabupaten/Kota memilih Desa/Kelurahan yang telah ditentukan, kemudian diambil sampel dari keluarga yang telah diintervensi program P4GN selama tahun 2024;
- c. Klasifikasi indeks rata-rata ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dikategorikan sebagai berikut :

Klasifikasi Indeks Rata-rata Ketahanan Diri (anti) Narkoba	
Kategori	Interval ketahanan Diri (anti) Narkoba
Sangat Tinggi	88,31 - 100
Tinggi	76,61 – 88,30
Rendah	65 – 76,60
Sangat Rendah	25,00 – 64,99

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 6 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 7 kabupaten/kota atau sebesar 116,67%. Adapun daftar pencapaian Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ialah sebagai berikut:

No	Kabupaten / Kota	Nilai Indeks Ketahanan Keluarga	Kategori
1.	Kota Pontianak	94,196	Sangat Tinggi
2.	Kota Singkawang	77,679	Tinggi
3.	Kabupaten Mempawah	89,554	Sangat Tinggi
4.	Kabupaten Sanggau	84,554	Tinggi
5.	Kabupaten Bengkayang	81,429	Tinggi
6.	Kabupaten Sintang	82,946	Tinggi
7.	Kabupaten Kubu Raya	87,768	Tinggi

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (7/6) * 100\%$ $= 116.67\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Jumlah Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (7/5) * 100\%$ $= 140\%$	$\sum \text{JTA} = \text{Jumlah Realisasi Tahun Anggaran ini}$ $\sum \text{JM} = \text{Target Jangka Menengah}$

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Tersedianya anggaran pelaksanaan fasilitasi terhadap keluarga dan pemerintahan desa pada 7 (tujuh) kabupaten/kota yang berada di wilayah Kalimantan Barat.
2. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada jajaran dalam mencapai nilai indeks ketahanan keluarga
3. Adanya dukungan yang baik dari lingkungan masyarakat dan pemerintah desa di wilayah kerja 7 (tujuh) kabupaten/kota yang menjadi sasaran.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya dukungan anggaran perjalanan dinas ke luar bagi BNN Provinsi Kalimantan Barat sedangkan lokasi pelaksanaan kegiatan berada di luar kota,

sehingga agar kegiatan tetap terlaksana maka harus memanfaatkan anggaran pada kegiatan yang lain.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

3 **Sasaran :** Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	TARGET : 7 Kab / Kota	PENCAPAIAN : 7 100%	3.1
---	------------------------------------	----------------------------------	------------

Definisi operasional dari jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba.

Metode pengukuran jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi dengan kriteria yaitu :

- a. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
 - Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanaan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
 - Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
 - Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan diluar lingkungannya.
 - Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
 - Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.
- b. Dari hasil penghitungan kuesioner penilaian IKP yang telah dibagikan ke masing-masing kabupaten/kota didapatkan hasil sebagai berikut :

Klasifikasi Indeks Kemandirian Partisipatif	
Klasifikasi	Interval ketahanan Diri (anti) Narkoba
Tidak Mandiri	1,00 – 1,75
Kurang Mandiri	1,76 – 2,50
Mandiri	2,51 – 3,25
Sangat Mandiri	3,26 – 4,00

- c. Kabupaten/kota yang turut berpartisipasi dalam Program Pemberdayaan Anti Narkoba termonitor oleh BNN atas laporan BNN di kewilayahan.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 7 kabupaten/kota dengan Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi Kalimantan Barat dapat terealisasi sebanyak 7 kabupaten/kota atau sebesar 100%. Adapun daftar pencapaian Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori “Mandiri” di wilayah provinsi Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	Nilai IKP	Kategori
1.	Kota Pontianak	3,75	Sangat Mandiri
2.	Kabupaten Kubu Raya	3,45	Sangat Mandiri
3.	Kota Singkawang	3,57	Sangat Mandiri
4.	Kabupaten Mempawah	3,37	Sangat Mandiri
5.	Kabupaten Sanggau	3,96	Sangat Mandiri
6.	Kabupaten Bengkayang	3,59	Sangat Mandiri
7.	Kabupaten Sintang	3,23	Mandiri

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (7/7) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Jumlah Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (7/7) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{JTA} = \text{Jumlah Realisasi Tahun Anggaran ini}$ $\sum \text{JM} = \text{Target Menengah}$

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah:

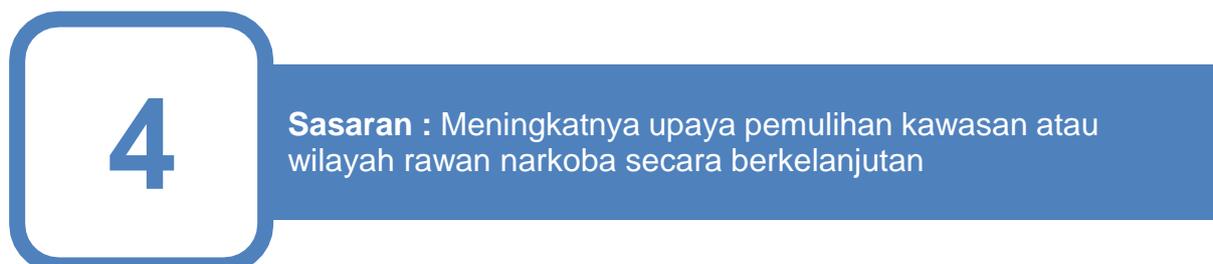
1. Tersedianya anggaran dalam penyelenggaraan program

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Beberapa penggiat yang sudah dilantik berpindah tempat bekerja dikarenakan berhenti atau mutasi, sehingga pengumpulan data IKP dari penggiat tersebut harus diwakilkan oleh rekan kerjanya yang lain yang belum mengikuti bimbingan teknis Penggiat P4GN.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.



4 Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



IKK : Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	TARGET : 1 Kawasan	PENCAPAIAN : 1 100%
---	--------------------------	---------------------------

4.1

Definisi operasional dari jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status alternatif guna mengurangi dampak buruk terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Metode pengukuran jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada" dengan kriteria yaitu:

1. Kawasan/wilayah yang masyarakat didalamnya mempunyai potensi menjadi penyalahguna, korban penyalah guna dan pengedar narkoba karena faktor lingkungan, faktor individu dan faktor ketersediaan narkoba;
2. Kawasan/wilayah rawan yang telah ditentukan, mendapatkan program pembinaan alternatif berupa pelatihan life skill yang diberikan oleh BNNP Kalimantan Barat dengan tujuan agar mantan pengguna dan pengedar dapat memperoleh kesempatan memiliki usaha yang halal dan tidak terjerumus lagi ke dalam Narkoba.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 1 kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori

“Tinggi” dapat terealisasi sebanyak 1 kabupaten/kota atau sebesar 100%. Adapun daftar pencapaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba ialah sebagai berikut :

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (1/1) \times 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{RIK} = \text{Jumlah Realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Jumlah target}$ Target

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian TA 2023	Pencapaian TA 2024	Ket.
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	100%	100%	Pencapaian IKK tahun ini sama dengan pencapaian pada periode sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat adalah :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (1/1) \times 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{JTA} = \text{Jumlah Realisasi Tahun}$ Anggaran ini $\sum \text{JM} = \text{Target Jangka Menengah}$

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan dari pemerintah Kecamatan Pemangkat dan Desa Pemangkat Kota mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai

berikut :

1. Keterbatasan instalasi yang diberikan kepada warga binaan, sehingga hasil panen belum cukup memenuhi kebutuhan warga desa terhadap sayuran.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain:

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.



Definisi operasional dari nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi adalah suatu alat ukur untuk mengukur sejauhmana intervensi program berhasil, berlanjut dan dirasakan masyarakat, dengan beberapa item pengukuran. Dalam konsep nilai keterpulihan kawasan rawan ini yang diukur, antara lain: (1) pelaksanaan program, (2) pelaksana program, (3) keberlanjutan program, (4) sinergi instansi pemerintah, (5) kemitraan duniausaha, (6) pelibatan organisasi sosial masyarakat (orsosmas), dan (7) hasil program yang dirasakan masyarakat.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja terkait nilai keterpulihan kawasan rawan (IKKR) yang diintervensi sebesar 2,44 dapat terealisasi sebesar 2,60 atau sebesar 106,57%.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	$=(\sum RIK / \sum TIK) * 100\%$	$=(2,60/2,44) \times 100\%$ $= 106,57\%$	$\sum RIK = \text{Nilai IKKR}$ $\sum TIK = \text{Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka

menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	$=(\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$=(2,60/2,51) \times 100\%$ $= 103,59\%$	$\sum JTA =$ Jumlah Realisasi Tahun Anggaran ini $\sum JM =$ Target Jangka Menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Peran Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang dominan dalam melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa dan masyarakat sasaran.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai

1. Stigma masyarakat terhadap pelaksanaan pemberdayaan alternatif di wilayah produsen kratom, karena masyarakat masih banyak yang menggantungkan hidup dengan membudidayakan tanaman kratom.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

5

Sasaran : Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan

sebagai berikut :



Definisi operasional dari Kualitas Hidup (WHO-QOL) adalah dapat didefinisikan sebagai persepsi individu mengenai posisi mereka dalam hidup sesuai konteks budaya dan sistem nilai dimana mereka hidup dan hubungannya dengan tujuan, harapan, standar yang ditetapkan dan perhatian seseorang (WHO-QOL Group dalam Lopez and Snyder, 2004). Untuk menilai kualitas hidup pada pasien dengan penyakit kronis, WHO mengembangkan instrumen penilaian kualitas hidup yaitu WHOQOL-100 yang terdiri dari 100 butir pertanyaan dalam 6 domain dan 24 facet. Untuk kepraktisan dikembangkan pula versi singkatnya yaitu WHOQOLBREF yang terdiri dari 26 pertanyaan dalam 4 domain yang terdiri:

- Pertanyaan domain Fisik: 3, 4, 10, 15, 16, 17 dan 18
- Pertanyaan domain psikologis: 5,6,7,11,19,26
- Pertanyaan domain Sosial: 20, 21, 22
- Pertanyaan domain lingkungan: 8,9,12,13,14,23,24,24

Dimensi Kualitas hidup

- ▶ Dimensi kesehatan fisik:
penilaian individu terhadap kesehatan fisiknya, seperti rasa sakit, rasa tidak nyaman dll.
- ▶ Dimensi kesejahteraan psikologis:
penilaian individu terhadap dirinya secara psikologis
- ▶ Dimensi hubungan sosial:
penilaian individu terhadap hubungannya dengan orang lain
- ▶ Dimensi hubungan lingkungan:
penilaian individu terhadap hubungannya dengan tempat tinggal, sarana, dan prasarana yang dimilikinya

Domain pertanyaan WHO-QoL

1. Fisik,

- a. Aktivitas sehari-hari: menggambarkan kesulitan yang dirasakan individu ketika melakukan kegiatan sehari-hari.
- b. Ketergantungan terhadap obat-obatan dan bantuan tenaga medis: menggambarkan seberapa besar kecenderungan individu dalam menggunakan obat-obatan atau bantuan medis lainnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- c. Energi: menggambarkan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari.
- d. Mobilitas: menggambarkan tingkat perpindahan yang mampu dilakukan oleh individu dengan mudah dan cepat.
- e. Rasa sakit: menggambarkan sejauh mana perasaan keresahan yang dirasakan individu terhadap hal-hal yang menyebabkan individu merasa sakit.
- f. Kepuasan tidur: menggambarkan kualitas tidur dan istirahat yang dimiliki oleh individu.
- g. Kemampuan bekerja: menggambarkan kemampuan yang dimiliki individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya.

2. Psikologis,

- a. Bentuk tubuh dan penampilan: menggambarkan bagaimana individu memandang keadaan tubuh serta penampilannya.
- b. Perasaan negatif: menggambarkan adanya perasaan yang tidak menyenangkan yang dimiliki oleh individu.
- c. Perasaan positif: menggambarkan perasaan yang menyenangkan yang dimiliki oleh individu.
- d. Penghargaan diri: melihat bagaimana individu menilai atau menggambarkan dirinya sendiri.
- e. Kerohanian/agama/kepercayaan seseorang/seberapa besar arti kehidupan.
- f. Pikiran, pengetahuan, memori, konsentrasi: menggambarkan keadaan kognitif individu yang memungkinkan untuk berkonsentrasi, belajar dan menjalankan fungsi kognitif lainnya.

3. Lingkungan

- a. Sumber penghasilan: menggambarkan keadaan keuangan individu.
- b. Kebebasan, keselamatan fisik dan keamanan: menggambarkan tingkat keamanan individu yang dapat mempengaruhi kebebasannya.
- c. Kemudahan akses dan kualitas dari pelayanan kesehatan dan social: menggambarkan ketersediaan layanan kesehatan dan perlindungan sosial yang dapat diperoleh individu.
- d. Lingkungan rumah: menggambarkan keadaan tempat tinggal individu.
- e. Kemudahan untuk mendapatkan informasi dan keahlian terbaru: menggambarkan ada atau tidaknya kesempatan bagi individu untuk memperoleh hal – hal baru yang berguna bagi individu.
- f. Partisipasi dan kesempatan untuk rekreasi/kegiatan yang menyenangkan: menggambarkan sejauhmana individu memiliki kesempatan dan dapat bergabung untuk berkreasi dan menikmati waktu luang.
- g. Polusi/kebisingan/lalu lintas/iklim di lingkungan fisik: menggambarkan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal individu (keadaan air, saluran udara, iklim, polusi dan lain-lain).

4. Hubungan Sosial

- a. Hubungan personal: menggambarkan hubungan individu dengan orang lain.
- b. Dukungan sosial: menggambarkan adanya bantuan yang didapatkan oleh individu yang berasal dari lingkungan sekitarnya.
- c. Kehidupan seksual: menggambarkan kegiatan seksual yang dilakukan individu.

Penghitungan data

- ▶ Pernghituanan data:
- ▶ Domain Fisik= $((6-Q3) + (6-Q4) + Q10 + Q15 + Q16 + Q17 + Q18) \times 4$.
- ▶ Domain Psikologis= $(Q5 + Q6 + Q7 + Q11 + Q19 + (6-Q26)) \times 4$.
- ▶ Domain Hubungan Sosial= $(Q20 + Q21 + Q22) \times 4$.
- ▶ Domain Lingkungan= $(Q8 + Q9 + Q12 + Q13 + Q14 + Q23 + Q24 + Q25) \times 4$.

Apabila dari 20% data tidak lengkap, maka asesmen dibatalkan

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 59% persen

penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami kualitas hidup dengan capaian terealisasi sebanyak 88,79% atau sebesar 150,49%.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami kualitas hidup	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (88.79/59) * 100$ $\% = 150,49\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK}$ $= \text{Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Sarana dan prasarana, berupa anggaran sudah dialokasikan dalam DIPA secara efektif;
2. Kualitas SDM dari petugas yang melaksanakan layanan sudah mendapatkan penguatan teknis dan tersertifikasi secara kompetensi;
3. Pelaksanaan layanan Rehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan SOP;

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut : tidak ditemukan adanya hambatan berarti dalam pengukuran kualitas hidup (WHO-QoL) yang dilakukan terhadap 34 orang klien yang mengikuti layanan Pascarehabilitasi di BNN Provinsi Kalimantan Barat.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Dibutuhkan pengendalian untuk memastikan pelaksanaan layanan berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memungkinkan adanya koreksi jika terjadi penyimpangan;
2. Supervisi melalui pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat BNNP sampai ke BNNK yang berkaitan dengan manajemen layanan Rehabilitasi yang diselenggarakan dan pelaksanaan teknis yang dilakukan dalam program layanan Rehabilitasi;
3. Kegiatan pengamatan secara terus-menerus tentang penyelenggaraan layanan terhadap klien dengan tujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh, agar dapat melakukan tindakan

koreksi untuk penyempurnaan kebijakan selanjutnya:

4. Evaluasi untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Dengan evaluasi dapat meningkatkan kualitas kerja dan memastikan bahwa penyelenggara layanan telah sesuai dengan perencanaan.

6 Sasaran : Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	TARGET : 80 Petugas	PENCAPAIAN : 80 100%	6.1
--	---------------------------	----------------------------	-----

Definisi operasional dari petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM. Metode pengukuran jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebanyak 80 petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih dapat terealisasi sebanyak 80 petugas atau sebesar 100%. Adapun daftar Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih ialah sebagai berikut :

No	Kabupaten / Kota	Target Petugas	Realisasi
1.	BNNP Kalimantan Barat	10 orang	10 orang
2.	BNN Kota Pontianak	10 orang	10 orang

3.	BNN Kota Singkawang	10 orang	10 orang
4.	BNN Kabupaten Mempawah	10 orang	10 orang
5.	BNN Kabupaten Sanggau	10 orang	10 orang
6.	BNN Kabupaten Bengkayang	10 orang	10 orang
7.	BNN Kabupaten Sintang	10 orang	10 orang
8.	BNN Kabupaten Kubu Raya	10 orang	10 orang
JUMLAH TOTAL		80 orang	80 orang

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (80/80) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (80/160) * 100\%$ $= 50\%$	$\sum \text{JTA} =$ Jumlah Realisasi Tahun Anggaran ini $\sum \text{JM} = \text{Target}$ Jangka Menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan maksimal dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pembentukan IBM dan pelatihan (bimbingan teknis) kepada petugas rehabilitasi di IBM.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Animo masyarakat yang bersedia direhabilitasi / mengantarkan keluarganya untuk rehabilitasi yang rendah, sehingga pelaksanaan rehabilitasi di IBM agak tersendat.

2. Latar belakang petugas IBM yang bermacam-macam, sehingga terjadi sedikit kendala dalam pemberian materi rehabilitasi.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.
4. Selektif dalam pemilihan agen pemulihan / petugas rehabilitasi IBM agar didapat petugas yang berkualitas.

7 Sasaran : Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	TARGET : 1 Lembaga	PENCAPAIAN : 2 200%	7.1
---	---------------------------------	----------------------------------	------------

Definisi operasional dari lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi adalah lembaga rehabilitasi yang telah memperoleh intervensi peningkatan kemampuan oleh BNN dalam rangka meningkatkan kualitas layanannya dan mampu memenuhi standar layanan. Metode pengukuran jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah lembaga rehabilitasi narkoba yang telah mampu mempertahankan dan memenuhi standar layanan dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 1 lembaga

rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 2 lembaga atau sebesar 200%.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (2/1) * 100\%$ $= 200\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (2/8) * 100\%$ $= 25\%$	$\sum \text{JTA} = \text{realisasi}$ Tahun anggaran ini $\sum \text{JM} = \text{Target}$ Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Klinik Pratama dibawah binaan BNN Provinsi Kalimantan Barat telah operasional dan diisi dengan petugas-petugas yang berpengalaman dibidangnya.
2. Seluruh wilayah yang memiliki satuan kerja vertikal BNN memiliki Klinik Rehabilitasi, serta beberapa kabupaten yang tidak ada BNNK telah memiliki Lembaga rehabilitasi narkotika (Kabupaten Sambas dan Sekadau)

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan BNN dalam menyediakan Sumber daya (SDM, Keuangan dan sarana prasarana) guna menunjang pemenuhan syarat Standar Pelayanan Minimal.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain:

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung layanan rehabilitasi.

2. Mengutkan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya pada kabupaten yang belum ada BNNK nya.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

IKK : Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat

TARGET :
16
Unit IBM

PENCAPAIAN :
16
100%

7.2

Definisi operasional dari unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya.

Metode pengukuran jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 16 unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi dapat terealisasi sebesar 16 unit atau sebesar 100%.

No	Kabupaten / Kota	IBM Yang Terbentuk	Jumlah Agen Pemulihan	Ket
1.	BNNP Kalimantan Barat	2 Unit	10 AP	IBM Desa Hilir Kantor-Kec. Ngabang-Kab. Landak dan IBM Kel. Suka Harja-Kec.Delta Pawan-Kab. Ketapang
2.	BNN Kota Pontianak	2 Unit	10 AP	IBM Kelurahan Tengah-Kec. Pontianak Kota dan

				IBM Kel. Parit Mayor-Kec. Pontianak Timur
3.	BNN Kota Singkawang	2 Unit	10 AP	IBM Kel. Sekip Lama-Kec. Singkawang Tengah dan IBM Kel. Jawa-Kec. Singkawang Tengah
4.	BNN Kabupaten Mempawah	3 Unit	10 AP	IBM Desa Galang-Kec. Sungai Pinyuh dan IBM Kel. Sungai Pinyuh-Kec. Pinyuh
5.	BNN Kabupaten Sanggau	2 Unit	10 AP	IBM Desa Meliau Hilir-Kec. Meliau dan IBM Desa Meliau Hulu-Kec. Meliau
6.	BNN Kabupaten Bengkayang	2 Unit	10 AP	IBM Desa Kumba-Kec. Kec. Jagoi Babang dan IBM Desa Lembang-Kec. Sanggau Ledo
7.	BNN Kabupaten Sintang	2 Unit	10 AP	IBM Kel. Tanjung Puri-Kec. Sintang dan IBM Kel. Ladang-Kec. Sintang
8.	BNN Kabupaten Kubu Raya	2 Unit	10 AP	IBM Desa Arang Limbung-Kec. Sungai Raya dan IBM Desa Sungai Rengas-Kec. Sungai Kakap

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (16/16) * 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} =$ Target

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di wilayah provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$= (16/32) * 100\%$ $= 50\%$	$\sum JTA =$ realisasi Tahun anggaran ini $\sum JM =$ Target Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan maksimal dari pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam pembentukan IBM dan pelatihan (bimbingan teknis) kepada petugas rehabilitasi di IBM.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Animo masyarakat yang bersedia direhabilitasi / mengantarkan keluarganya untuk rehabilitasi yang rendah, sehingga pelaksanaan rehabilitasi di IBM agak tersendat.
2. Latar belakang petugas IBM yang bermacam-macam, sehingga terjadi sedikit kendala dalam pemberian materi rehabilitasi.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dengan baik.
2. Mempersiapkan kegiatan dengan matang dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.
4. Selektif dalam pemilihan agen pemulihan / petugas rehabilitasi IBM agar didapat petugas yang berkualitas.



Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat

TARGET :
3,06
IKM

PENCAPAIAN :
3,57
116,66%

8.1

Definisi operasional dari indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. Metode pengukuran indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 3.06 untuk nilai indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat dapat terealisasi sebesar 3.57 atau sebesar 116,66%.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (3,57/3,06) * 100\%$ $= 116.66\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan perbedaan sasaran strategis maupun indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (3,57/3,7) * 100\%$ $= 96,49\%$	$\sum \text{JTA} =$ Realisasi Tahun Anggaran ini $\sum \text{JM} = \text{Target}$

				Jangka Menengah
--	--	--	--	-----------------

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Klinik Pratama dibawah binaan BNN Provinsi Kalimantan Barat telah operasional dan diisi dengan petugas-petugas yang berpengalaman dibidangnya.
2. Seluruh wilayah yang memiliki satuan kerja vertikal BNN memiliki Klinik Rehabilitasi, serta beberapa kabupaten yang tidak ada BNNK telah memiliki Lembaga rehabilitasi narkotika (Kabupaten Sambas dan Sekadau)

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan BNN dalam menyediakan Sumber daya (SDM, Keuangan dan sarana prasarana) guna menunjang pemenuhan syarat Standar Pelayanan Minimal.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung layanan rehabilitasi.
2. Mengutkan koordinasi dengan pemerintah daerah, khususnya pada kabupaten yang belum ada BNNK nya.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.



Sasaran : Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	TARGET : 8 Berkas Perkara	PENCAPAIAN : 10 125%	9.1
--	--	-----------------------------------	------------

Definisi dari Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah Jumlah kasus tindak pidana narkotika yang terungkap dan terselesaikan. Pengukuran terhadap indikator kinerja kegiatan ini adalah menghitung jumlah kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap dan diselesaikan. Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 di Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

No	Satuan Kerja	Target	Realisasi	Pencapaian
1	BNNP Kalimantan Barat	8	10	125%
TOTAL		8	10	125%

Dari nilai total jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21 adalah sebanyak 10 Berkas atau dapat diartikan 125% dari total target sebanyak 8 Berkas.

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (10/8) * 100\%$ $= 125\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan ini dengan pencapaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian TA. 2023	Pencapaian TA. 2024	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	112,5%	125%	Terjadi peningkatan pencapaian kinerja Sebesar 12,5% dari periode sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang P-21	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (10/84) * 100\%$ $= 11,90\%$	$\sum \text{JTA} = \text{realisasi}$ Tahun anggaran ini $\sum \text{JM} = \text{Target}$ Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan teknologi dari BNN RI dalam pelaksanaan penyelidikan dan

pengumpulan data lapangan.

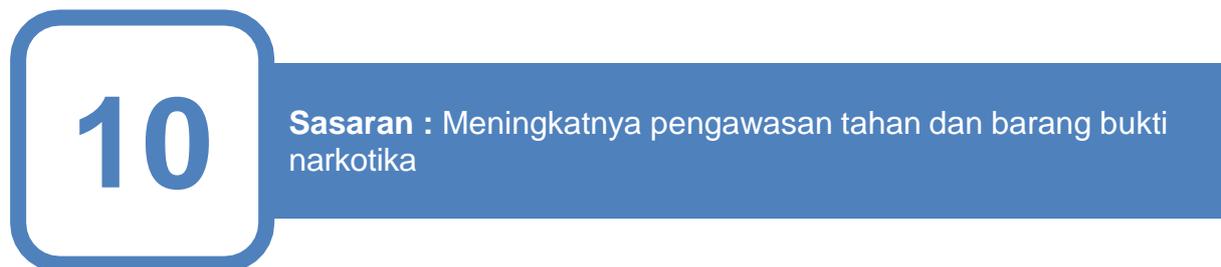
2. Dukungan Stakeholder terkait pemberantasan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba (Polda Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjung Pura, Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat dll)

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya anggaran dan sarana prasarana sehingga masih sangat tergantung pada dukungan teknologi dari BNN RI.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain:

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung.
2. Memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.



10 Sasaran : Meningkatkan pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



IKK : Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	TARGET : 100 Persen	PENCAPAIAN : 100 100%	10.1
--	----------------------------------	------------------------------------	-------------

Definisi operasional tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan adalah kondisi tidak terjadinya segala gangguan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan yang dapat mengganggu proses penyidikan meliputi:

tidak adanya tahanan yang kabur, perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas.

Metode pengukurannya dengan mendata kejadian tahanan yang kabur, kejadian perkelahian antar tahanan yang menyebabkan cedera serius atau kematian, dan kejadian hilangnya nyawa tahanan akibat kelalaian petugas di lingkungan Rumah Tahanan BNN.

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

- a = jumlah tahanan yang kabur
- b = jumlah tahanan yang menderita cedera serius atau kematian akibat perkelahian
- c = jumlah tahanan yang meninggal akibat kelalaian petugas Nilai tingkat keamanan, ketertiban dan kesehatan berada pada range 1 s.d.100.

Maka:

$$\text{Indikator Kinerja} : 10 \times 100\% \over 10$$

$$\text{Indikator Kinerja} : 1 \times 100\%$$

$$\text{Indikator Kinerja} : 100\%$$

$$\text{Indikator Kinerja} : \frac{\text{Jumlah seluruh tahanan} - (a + b + c)}{\text{Jumlah seluruh tahanan}} \times 100\%$$

Maka penhitungan indikator kinerja adalah:

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	$=(\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$=(100/100) \times 100\% = 100\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan ini dengan pencapaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian TA. 2023	Pencapaian TA. 2024	Ket.
1.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba yang P-21	100%	100%	Pencapaian TA 2024 sama dengan TA 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang

tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	$= (\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$= (100/100) * 100\% = 100\%$	$\sum JTA =$ realisasi Tahun anggaran ini $\sum JM =$ Target Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan Stakeholder terkait penanganan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba (Polda Kalimantan Barat).

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumber daya anggaran dan sarana prasarana (BNN Provinsi Kalimantan Barat belum memiliki rumah tahanan / sel) sehingga masih sangat tergantung pada dukungan Direktorat Tahanan dan barang Bukti Polda Kalimantan Barat.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung.
2. Memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.



Definisi Operasional Tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non-narkoba, adalah kondisi keutuhan dan/atau kondisi penyusutan secara wajar pada barang bukti

narkotika dan non-narkotika.

Pengukurannya dengan membandingkan data kondisi barang bukti narkotika dan non-narkotika pada saat diterima dari penyidik dengan waktu dikeluarkan untuk proses pemusnahan atau diserahkan untuk tahap penuntutan (tahap II).

Satuan pengukuran adalah per-BA penitipan dan BA pengeluaran.

Jika jumlah dan jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan barang bukti dan BA pengeluaran, maka diperoleh nilai $a = 1$, jika terdapat perbedaan baik jumlah maupun jenis barang bukti yang tercantum dalam BA penitipan dan BA pengeluaran, maka $a = 0$

a_1 = untuk barang bukti 1

a_2 = untuk barang bukti 2, dst..

Nilai tingkat keamanan barang bukti berada pada range 1 s.d 100

Maka:

Dengan y = jumlah BA (penitipan), dan asumsi: jumlah BA penitipan = jumlah BA pengeluaran.

Maka penghitungan indikator kinerja adalah:

Indikator kinerja = $7 \times 100\%$

Indikator kinerja = $1 \times 100\%$

Indikator kinerja = 100%

$$\text{Indikator kinerja} = \frac{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_y}{y} \times 100\%$$

DAFTAR REKAPITULASI BARANG BUKTI

Shabu	Ganja	Ekstasi
±27.346,68 Gram	±18.891,72 Gram	7,64 Gram

Perhitungan pencapaian indikator kinerja kegiatan ini ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-Narkotika	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (100/100) \times 100\%$ $= 100\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Perbandingan Indikator Kinerja Kegiatan ini dengan pencapaian periode sebelumnya adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian TA. 2023	Pencapaian TA. 2024	Ket.
1.	Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	100%	100%	Pencapaian TA 2024 sama dengan TA 2023

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non-narkotika	$=(\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$=(100/100) \times 100\%$ = 100%	$\sum JTA$ = realisasi Tahun anggaran ini $\sum JM$ = Target Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Dukungan *Stakeholder* terkait penanganan tahanan dan barang bukti tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika (Polda Kalimantan Barat).

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya sumberdaya anggaran dan sarana prasarana (BNN Provinsi Kalimantan Barat hanya memiliki 1 brankas khusus barang bukti).

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Mengusulkan penambahan sumberdaya (SDM dan sarana prasarana) pendukung.
2. Memperkuat koordinasi dengan stake holder terkait.
3. Membangun sinergi dengan bidang lain agar tercipta harmoni dalam pelaksanaan kegiatan dan menghindarkan ego sektoral.

11

Sasaran : Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat

TARGET:
80
NKA

PENCAPAIAN :
98,10
122,63%

11.1

Definisi operasional indikator kinerja Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 22/PMK.02/2021, yang dinilai meliputi:

- a. Aspek implementasi : Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaiankeluaran.
- b. Aspek manfaat : Implementasi Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Adapun metode pengukuran indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran BNN” adalah penilaian akumulatif dari bobot capaian mulai dari capaian kinerja satker hingga menjadi capaian kinerja BNN.

Pengukurannya terdiri dari :

1. Aspek Implementasi (bobot 33,3%):
 - a. Penyerapan sebesar 9,7%
 - b. Konsistensi 18,2%
 - c. Capaian Output 43,5%

- d. Efisiensi 28,6%
2. Aspek manfaat (bobot 67,7%).

Aspek Manfaat merupakan aspek yang mengukur perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan / atau pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah dicapai.

Untuk Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satuan Kerja/Kegiatan dihitung berdasarkan nilai kinerja anggaran atas Aspek Implementasi tingkat Satuan Kerja/Kegiatan terkait. Dari penilaian aspek implementasi tersebut maka dihitung pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNNP Kalimantan Barat sebagai berikut:

No	Aspek	Nilai	Bobot	Nilai x Bobot
1	Aspek Implementasi	98,10	100%	98,10
Nilai Kinerja Anggaran				98,10

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat kita simpulkan pencapaian nilai kinerja anggaran adalah sebesar 98,10 atau 122,63% dari target 80. Adapun perhitungan pencapaian kinerja pada indicator ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat	$=(\sum RIK / \sum TIK) * 100\%$	$=(98,10/80) \times 100\%$ $= 122,63\%$	$\sum RIK =$ Realisasi $\sum TIK =$ Target

Jika pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 dibandingkan dengan pencapaian tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Pencapaian Tahun 2023	Pencapaian Tahun 2024	Keterangan
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat	72,25	98,10	Terjadi peningkatan pencapaian sebesar 35,73% dari pencapaian tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Kinerja Anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$= (98,10/90) * 100\%$ $= 109,98\%$	$\sum JTA$ = realisasi Tahun anggaran ini $\sum JM$ = Target jangka Menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidangnya.
2. Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala BNN Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Monitoring dan Evaluasi rutin setiap triwulan dilaksanakan untuk memastikan progress pencapaian target.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya pelaksana kegiatan hanya mengacu pada dokumen Pedoman Operasional Kerja saja, tanpa bertujuan untuk melakukan efisiensi baik efisiensi anggaran maupun efisiensi metode pelaksanaan.

Rekomendasi / rencana aksi kedepan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain:

1. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran dengan lebih baik, agar tercapai target realisasi, capaian output dan konsistensi yang tinggi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan, khususnya pada capaian output dan konsistensi rencana penarikan dana.
3. Efisiensi terhadap pelaksanaan anggaran.

IKK : Jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target

TARGET :
1
BNNK

PENCAPAIAN :
7
700%

11.2

Definisi operasional dari jumlah BNN Kabupaten / Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Indikator Kinerja Anggaran (NKA) mencapai target adalah jumlah satuan kerja BNN yang mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian

Kinerja Satuan Kinerja. Pada penilaian Kinerja Anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PKM.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga. Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang memiliki Nilai Kinerja Anggaran diatas target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 1 BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan jumlah Nilai Kinerja Anggaran di atas target untuk semua BNNK Kabupaten/Kota. Adapun daftar pencapaian Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

SATKER	TARGET NKA	NKA	KET
BNN Provinsi Kalimantan Barat	80	98,81	Di atas Target
BNN Kota Pontianak	87	97,72	Di atas Target
BNN Kabupaten Kubu Raya	89	99,70	Di atas Target
BNN Kota Singkawang	85	96,67	Di atas Target
BNN Kabupaten Mempawah	87	99,99	Di atas Target
BNN Kabupaten Sanggau	90	100,00	Di atas Target
BNN Kabupaten Bengkayang	88	99,96	Di atas Target
BNN Kabupaten Sintang	88	99,12	Di atas Target

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (7/1) \times 100\%$ $= 700\%$	$\sum \text{RIK} = \text{realisasi}$ $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan pada periode sebelumnya indikator ini tidak terdapat dalam target kinerja satuan kerja. Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalbar dengan NKA mencapai target	$= (\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$= (7/7) \times 100\%$ $= 100\%$	$\sum JTA =$ realisasi tahun anggaran ini $\sum JM =$ Target jangka menengah

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran belum maksimal, dikarenakan masih banyaknya pelaksana kegiatan hanya mengacu pada dokumen Pedoman Operasional Kerja saja, tanpa bertujuan untuk melakukan efisiensi baik efisiensi anggaran maupun efisiensi metode pelaksanaan.
2. Belum adanya pemerataan SDM yang baik untuk seluruh Satuan Kerja BNN Kabupaten/Kota.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran dengan lebih baik, agar tercapai target realisasi, capaian output dan konsistensi yang tinggi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan, khususnya pada capaian output dan konsistensi rencana penarikan dana.
3. Efisiensi terhadap pelaksanaan anggaran.

12

Sasaran : Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 2 (dua) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :



Definisi operasional dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Metode pengukuran Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada empat aspek pengukuran yaitu :

1. Kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang perencanaan dalam DIPA. Ada tiga indikator pada aspek ini yaitu: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA;
2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap kepatuhan Satker terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan anggaran. Terdapat empat indicator dalam aspek ini yakni: Data Kontrak; Pengelolaan UP dan TUP; LPJ Bendahara; dan Dispensasi SPM.
3. Efektivitas pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap pencapaian output dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran. Satu indikator yang ada pada

aspek ini yaitu terkait Penyerapan anggaran; Penyelesaian tagihan; Capaian output.

4. Efisiensi pelaksanaan anggaran, merupakan penilaian terhadap ketepatan Satker dalam melakukan pembayaran atas beban DIPA. Kesalahan SPM dan Perencanaan Kas menjadi dua indikator yang ada terkait aspek ini.

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 97,79 untuk Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada BNN Provinsi Kalimantan Barat dapat terealisasi sebesar 97,98 atau sebesar 100,19%. Adapun pencapaian Nilai kinerja anggaran BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

Perhitungan pencapaian kinerja pada indicator ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (97,98 / 97,79) * 100\%$ $= 100,19\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} =$ Target

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan pada periode sebelumnya indikator ini tidak terdapat dalam target kinerja satuan kerja. Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Provinsi Kalimantan Barat	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (97,98 / 94) * 100\%$ $= 104,23\%$	$\sum \text{JTA} =$ realisasi Tahun anggaran ini $\sum \text{JM} =$ Target jangka Menengah Anggaran ini

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Perencanaan dan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidangnya.
2. Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala BNN Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

3. Monitoring dan Evaluasi rutin setiap triwulan dilaksanakan untuk memastikan progress pencapaian target.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan, khususnya pada pembuatan, pengesahan dan penyampaian dokumen keuangan (SPP, SPM dll).
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana (konsistensi rencana penarikan dana).



Definisi operasional dari Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target adalah perhitungan terhadap jumlah satuan kerja BNN Kabupaten / Kota yang mendapatkan penilaian diatas 94 pada indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Metode pengukuran Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target diukur dengan cara mendata jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat yang memiliki nilai IKPA mencapai target .

Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 7 BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target dapat terealisasi sebesar 4 BNN Kab/Kota atau sebesar 57,14%. Adapun daftar pencapaian IKPA per satuan kerja adalah sebagai berikut:

SATKER	TARGET IKPA	IKPA	KET
BNNP Kalimantan Barat	97,79	97,98	Melebihi Target

BNN Kabupaten Kubu Raya	100	99,89	Tidak mencapai Target
BNN Kota Pontianak	97,74	98,15	Melebihi Target
BNN Kota Singkawang	96,85	96,75	Tidak mencapai Target
BNN Kabupaten Mempawah	92	99,97	Melebihi Target
BNN Kabupaten Sanggau	100	100	Mencapai Target
BNN Kabupaten Bengkayang	99,80	99,92	Melebihi Target
BNN Kabupaten Sintang	99,86	98,37	Tidak mencapai Target

Perhitungan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target	$= (\sum \text{RIK} / \sum \text{TIK}) * 100\%$	$= (4/7) * 100\%$ $= 57,14\%$	$\sum \text{RIK} =$ Realisasi $\sum \text{TIK} = \text{Target}$

Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan pencapaian periode sebelumnya dikarenakan pada periode sebelumnya indikator ini tidak terdapat dalam target kinerja satuan kerja.

Indikator Kinerja Kegiatan ini jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Program Kerja Badan Narkotika Nasional Kalimantan Barat ialah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi Kalimantan Barat dengan Nilai IKPA mencapai target	$= (\sum \text{JTA} / \sum \text{JM}) * 100\%$	$= (4/7) * 100\%$ $= 57,14\%$	$\sum \text{JTA} = \text{realisasi}$ Tahun anggaran Ini $\sum \text{JM} = \text{Target}$ Jangka menengah

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Sebagian satuan kerja BNN dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidangnya.
2. Pengawasan berjenjang yang dilaksanakan oleh Kepala BNN Provinsi dan para Kepala BNN Kabupaten / Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
3. Monitoring dan Evaluasi rutin oleh BNN Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan untuk memastikan progress pencapaian target.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Beberapa indikator penilaian pada IKPA BNN Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat masih belum optimal dikarenakan beberapa kesalahan dan kelalaian dari pengelola keuangan, seperti Deviasi Halaman III DIPA dibawah nilai 90, Keterlambatan Ganti Uang Persediaan, Kesalahan SPM, Retur SP2D dan terlambat dalam penyampaian LPJ bendahara.

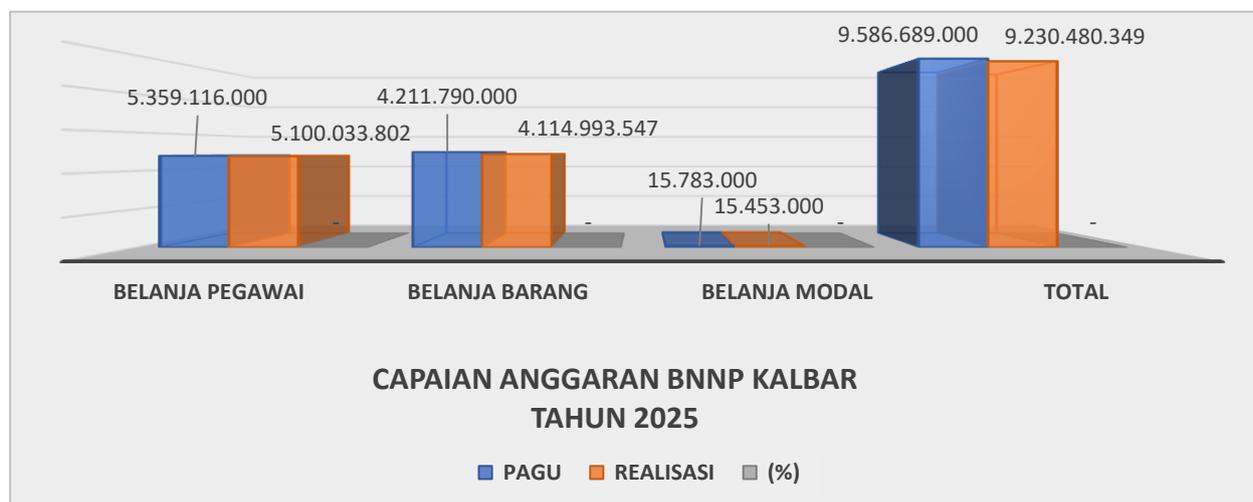
Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan kegiatan.
2. Memberikan bimbingan teknis, asistensi dan pendampingan kepada pengelola keuangan di BNN Kabupaten / Kota.
3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dana (konsistensi rencana penarikan dana).

B. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2024 BNN Provinsi Kalimantan Barat mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 9.586.689.000,- (Sembilan miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%	SISA	%
1	Belanja Pegawai	5.359.116.000	5.100.033.802	95,17%	259.082.198	4,83%
2	Belanja Barang	4.211.790.000	4.114.993.547	97,70%	96.796.453	2,20%
3	Belanja Modal	15.783.000	15.453.000	97,91%	330.000	2,19%
Total		9.586.689.000	9.230.480.349	96,28%	356.208.651	3,72%



13

Sasaran : Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal

Sasaran kegiatan diatas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

IKK : Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal

TARGET :
75
Indeks

PENCAPAIAN :
75,05
100,06%

13.1

Definisi operasional dari Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal di BNN Provinsi Kalimantan Barat adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Indikator dari komponen ini antara lain adanya kebijakan standar pelayanan, implementasi budaya pelayanan prima serta melaksanakan survei kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan dan melakukan tindak lanjut atas hasil survei tersebut.

Terdapat 6 (enam) komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Nilai Zona Integritas adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur enam komponen tersebut yang tertuang dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas yang dinilai secara internal oleh Inspektorat.

Metode Pengukuran Integritas adalah hasil penilaian Inspektorat terhadap Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) dan data dukung yang diisi dan dikumpulkan oleh Tim Pembangunan Zona Integritas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat

pada tahun 2024. Dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 71,42 atau 95,22% dari 75. Adapun perhitungan pencapaian kinerja pada indikator ini adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Formula	Hasil Perhitungan	Ket.
1.	Nilai Zona Integritas BNN berdasarkan Penilaian Internal	$= (\sum JTA / \sum JM) * 100\%$	$= (75,05/75) * 100\%$ $= 100,06\%$	$\sum JTA = \text{realisasi}$ Tahun anggaran ini $\sum JM = \text{Target}$

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target adalah :

1. Kerjasama antar Tim Zona Integritas BNNP Kalimantan Barat dalam Upaya memenuhi data dukung yang terdapat dalam 6 (enam) komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan.

Hambatan / kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Beberapa indikator penilaian dalam Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) masih belum optimal dipenuhi data dukung oleh Tim Zona Integritas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Rekomendasi / rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja antara lain :

1. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan dan pelaksanaan survei kepuasan Masyarakat di BNNP Kalimantan Barat.
2. Memperkuat koordinasi kembali antara bidang dan pelaksana fungsi pada layanan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
3. Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap hasil Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI) BNNP Kalimantan Barat setiap 1 (satu) semester.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024, merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat telah berhasil merealisasikan berbagai kegiatan melalui program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Program Kerja BNN Provinsi Kalimantan Barat.

Capaian ini didukung melalui realisasi kinerja 3 (tiga) pilar Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat yaitu 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang Rehabilitasi 3) Bidang Pemberantasan serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Capaian Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024 menggunakan pengukuran kinerja berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, target, realisasi, dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan 14 (empat belas) sasaran kegiatan yang akan dicapai, dengan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebanyak 20 (dua belas) indikator yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat tahun 2024 sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana strategis Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam laporan kinerja ini, dapat disimpulkan bahwa kinerja BNN Provinsi

Kalimantan Barat secara keseluruhan sudah dalam predikat Baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengukuran seluruh Indikator Kinerja kegiatan berada dalam kategori sangat baik. Walaupun ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang memang belum melampaui target, seperti: jumlah BNN Kabupaten/Kota di wilayah provinsi dengan nilai IKPA mencapai target dan jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori “Tinggi” di wilayah provinsi Kalimantan Barat

Dari temuan tersebut beberapa kendala yang masing terjadi antara lain :

1. Belum sesuainya pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan rencana kerja dan rencana penarikan dananya;
2. Kurangnya sumber daya (SDM, Anggaran dan Sarana Prasarana);
3. Belum adanya koordinasi dan harmonisasi kegiatan antar bidang, sehingga terlihat masih berjalan masing-masing;
4. Efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang masih belum optimal.

Adapun beberapa faktor pendukung keberhasilan antara lain :

1. Dukungan BNN RI dan para stakeholder (Polda Kalimantan Barat, Kodam XII/Tanjung pura, Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Barat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa);
2. Optimalisasi sumber daya yang ada.

Oleh karena itu perlu kiranya ditetapkan rencana aksi / rekomendasi perbaikan terhadap proses pelaksanaan kegiatan dan anggaran, yakni:

1. Meningkatkan sumberdaya yang ada, peningkatan kualitas SDM, usulan penambahan anggaran dan usulan penambahan sarana dan prasarana.
2. Berkoordinasi dengan Stakeholder terkait, khususnya pemerintah daerah dala pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan dengan masyarakat;
3. Melakukan efisiensi pelaksanaan kegiatan, baik efisiensi anggaran maupun efisiensi metode pelaksanaan.

BAB V
LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2024

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si.
Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.
Jabatan : KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, 06 Maret 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

Pihak Pertama,
KEPALA BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kabupaten/Kota
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah provinsi	6 Kabupaten/Kota
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Mandiri" di wilayah provinsi	7 Kabupaten/Kota
4	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Jumlah kawasan rawan di wilayah provinsi yang beralih status dari "Bahaya" menjadi "Waspada"	1 Kawasan
5	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Nilai Keterpulihan Kawasan Rawan Yang diintervensi	2.44 Indeks
6	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	59 %
7	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	80 Orang
8	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang operasional di wilayah provinsi	1 Lembaga
9	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang operasional di wilayah provinsi	16 Unit
10	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan	3.06 Indeks

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	
11	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21	8 Berkas Perkara
12	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai Tingkat Keamanan, Ketertiban, dan Kesehatan Tahanan	100 %
13	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba	Nilai tingkat keamanan barang bukti narkoba dan non narkoba	100 %
14	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	80 Indeks
15	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan NKA mencapai target	1 Kabupaten/Kota
16	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97.79 Indeks
17	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Jumlah BNN Kabupaten/ Kota di wilayah provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	7 Kabupaten/Kota
18	Meningkatnya pengelolaan reformasi birokrasi unit kerja vertikal	Nilai Zona Integritas BNN Berdasarkan Penilaian Internal	75 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.711.600.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.858.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.1.709.907.000
4. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Rp.66.000.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.131.430.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.1.298.507.000
7. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.104.387.500
8. Kegiatan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi	Rp.150.000.000
9. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba	Rp.500.000.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.189.325.000
11. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.6.170.536.000
12. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.104.170.000

- | | |
|---|-------------------|
| 13. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp.93.278.000 |
| 14. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana | Rp.10.759.265.000 |
| 15. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Rp.90.000.000 |

Pihak Kedua,
**KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL**



MARTHINUS HUKOM, S.I.K., M.Si.

Surabaya, 06 Maret 2024
Pihak Pertama,
**KEPALA BNN PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**



Drs. SUMIRAT DWIYANTO, M.Si.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2024

Jakarta, 24 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Edaran Nomor : SE/127/IX/DE/PC.00/2020/BNN tanggal 30 September 2020 tentang Penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja Melalui Aplikasi Dektari;
- f. Surat Plt. Deputi Pencegahan Nomor : B/3653/XI/DE/PC.00/2024/BNN tanggal 12 November 2024 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari;
- g. Perjanjian kinerja Direktur Informasi dan Edukasi tahun 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

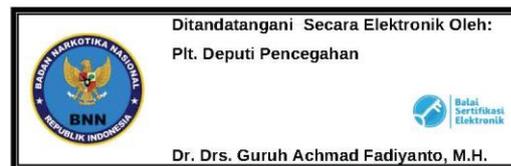
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diinformasikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Informasi dan Edukasi. Sesuai Peraturan Kepala BNN Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020 – 2024, dengan hasil sebagai berikut ;
- a. Penghitungan Dektari menggunakan aplikasi mobile Dektari Aja terhadap remaja usia 12 – 21 tahun (pelajar atau mahasiswa) yang telah menerima penyuluhan/sosialisasi oleh BNN Provinsi dan BNN Kab./Kota;
 - b. Hasil angka penghitungan Dektari Tahun 2024 adalah **52,04 (Tinggi)** Dengan target **53,51 (Tinggi)**, dengan klasifikasi hasil capaian wilayah :
 - Kategori Sangat Tinggi ($\geq 53,71$) sebanyak 104 Satker
 - Kategori Tinggi (49,74 – 53,50) sebanyak 54 Satker
 - Kategori Rendah (45,98 – 49,73) sebanyak 23 Satker
 - Kategori Sangat Rendah ($\leq 45,97$) sebanyak 26 Satker
 - c. Hasil penghitungan terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
	BNN PUSAT		
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	52.23	TINGGI
1	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	51.92	TINGGI
2	BNN KABUPATEN GAYO LUES	49.60	RENDAH
3	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	52.04	TINGGI
4	BNN KOTA SABANG	55.47	SANGAT TINGGI
5	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	50.47	TINGGI
6	BNN KOTA LANGSA	47.27	RENDAH
7	BNN KABUPATEN BIREUEN	48.96	RENDAH
8	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	38.79	SANGAT RENDAH
9	BNN KABUPATEN PIDIE	51.75	Tinggi
10	BNN KOTA BANDA ACEH	55.66	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI ACEH		50,38	TINGGI
2	BNNP SUMATERA UTARA	54.82	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN KARO	55.16	SANGAT TINGGI
12	BNN KOTA BINJAI	55.72	SANGAT TINGGI
13	BNN KOTA TANJUNG BALAI	51.91	TINGGI
14	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	53.42	TINGGI
15	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	42.08	SANGAT RENDAH
16	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	45.42	SANGAT RENDAH
17	BNN KABUPATEN LANGKAT	49.89	TINGGI
18	BNN KABUPATEN ASAHAN	52.48	TINGGI
19	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	36.12	SANGAT RENDAH
20	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	55.33	SANGAT TINGGI
21	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	50.11	TINGGI
22	BNN KOTA TEBING TINGGI	48.20	RENDAH
23	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	54.69	SANGAT TINGGI
24	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	52.12	TINGGI
25	BNN KABUPATEN BATU BARA	56.15	SANGAT TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
RATA-RATA SUMATERA UTARA		50.85	TINGGI
3	BNNP SUMATERA BARAT	55.80	SANGAT TINGGI
26	BNN KOTA SAWAHLUNTO	52.35	TINGGI
27	BNN KOTA PAYAKUMBUH	55.36	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN SOLOK	53.36	TINGGI
29	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	49.33	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA BARAT		53.24	TINGGI
4	BNNP RIAU	53.28	TINGGI
30	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	55.26	SANGAT TINGGI
31	BNN KABUPATEN PELALAWAN	54.26	SANGAT TINGGI
32	BNN KOTA PEKANBARU	50.28	TINGGI
33	BNN KOTA DUMAI	49.67	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI RIAU		52.55	TINGGI
5	BNNP JAMBI	38.53	SANGAT RENDAH
34	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	53.28	TINGGI
35	BNN KOTA JAMBI	53.65	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN BATANGHARI	43.60	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAMBI		47.26	RENDAH
6	BNNP SUMATERA SELATAN	54.23	SANGAT TINGGI
37	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	52.98	TINGGI
38	BNN KOTA PAGARALAM	55.93	SANGAT TINGGI
39	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	41.66	SANGAT RENDAH
40	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	49.38	RENDAH
41	BNN KOTA PRABUMULIH	54.73	SANGAT TINGGI
42	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	54.98	SANGAT TINGGI
43	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	49.09	RENDAH
44	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	49.41	RENDAH
45	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	55.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SUMATERA SELATAN		51.83	TINGGI
7	BNNP LAMPUNG	52.30	TINGGI
46	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	55.60	SANGAT TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	55.50	SANGAT TINGGI
48	BNN KOTA METRO	39.97	SANGAT RENDAH
49	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	47.28	RENDAH
50	BNN KABUPATEN WAY KANAN	45.42	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI LAMPUNG		49.35	RENDAH
8	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	55.73	SANGAT TINGGI
51	BNN KABUPATEN BANGKA	53.15	TINGGI
52	BNN KOTA PANGKAL PINANG	55.65	SANGAT TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
53	BNN KABUPATEN BELITUNG	51.69	TINGGI
54	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	55.94	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		54.43	SANGAT TINGGI
9	BNNP KEPULAUAN RIAU	54.39	SANGAT TINGGI
55	BNN KABUPATEN KARIMUN	55.84	SANGAT TINGGI
56	BNN KOTA BATAM	54.35	SANGAT TINGGI
57	BNN KOTA TANJUNG PINANG	55.84	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU		55.11	SANGAT TINGGI
10	BNNP BENGKULU	54.88	SANGAT TINGGI
58	BNN KOTA BENGKULU	52.16	TINGGI
59	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	49.61	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI BENGKULU		52.22	TINGGI
11	BNNP DKI JAKARTA	55.70	SANGAT TINGGI
60	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	55.64	SANGAT TINGGI
61	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	43.20	SANGAT RENDAH
62	BNN KOTA JAKARTA UTARA	43.71	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI DKI JAKARTA		49.56	RENDAH
12	BNNP BANTEN	43.44	SANGAT RENDAH
63	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	54.58	SANGAT TINGGI
64	BNN KOTA CILEGON	56.85	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA TANGERANG	55.80	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BANTEN		52.67	TINGGI
13	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.51	SANGAT TINGGI
66	BNN KABUPATEN SLEMAN	52.04	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANTUL	49.75	TINGGI
68	BNN KOTA YOGYAKARTA	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI DI YOGYAKARTA		53.29	TINGGI
14	BNNP JAWA BARAT	47.36	RENDAH
69	BNN KABUPATEN BOGOR	55.52	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN CIANJUR	55.25	SANGAT TINGGI
71	BNN KOTA BANDUNG	56.40	SANGAT TINGGI
72	BNN KOTA CIREBON	55.91	SANGAT TINGGI
73	BNN KOTA CIMAH	53.62	SANGAT TINGGI
74	BNN KABUPATEN SUKABUMI	55.72	SANGAT TINGGI
75	BNN KABUPATEN GARUT	55.72	SANGAT TINGGI
76	BNN KABUPATEN KUNINGAN	56.18	SANGAT TINGGI
77	BNN KABUPATEN CIAMIS	55.01	SANGAT TINGGI
78	BNN KOTA DEPOK	54.87	SANGAT TINGGI
79	BNN KABUPATEN KARAWANG	48.59	RENDAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
80	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	54.01	SANGAT TINGGI
81	BNN KOTA TASIKMALAYA	51.02	TINGGI
82	BNN KABUPATEN SUMEDANG	52.10	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA BARAT		53.82	SANGAT TINGGI
15	BNNP JAWA TENGAH	55.13	SANGAT TINGGI
83	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	54.41	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA TEGAL	55.88	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN BANYUMAS	54.63	SANGAT TINGGI
86	BNN KABUPATEN CILACAP	55.37	SANGAT TINGGI
87	BNN KABUPATEN KENDAL	54.01	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN BATANG	55.72	SANGAT TINGGI
89	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	55.73	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN MAGELANG	49.09	RENDAH
91	BNN KOTA SURAKARTA	45.36	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI JAWA TENGAH		53.53	TINGGI
16	BNNP JAWA TIMUR	54.71	SANGAT TINGGI
92	BNN KABUPATEN SUMENEP	55.67	SANGAT TINGGI
93	BNN KOTA MOJOKERTO	53.49	TINGGI
94	BNN KOTA MALANG	54.85	SANGAT TINGGI
95	BNN KOTA BATU	55.87	SANGAT TINGGI
96	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	56.07	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN NGANJUK	54.38	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN SIDOARJO	55.21	SANGAT TINGGI
99	BNN KOTA SURABAYA	46.86	RENDAH
100	BNN KOTA KEDIRI	55.65	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN MALANG	55.86	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN GRESIK	44.80	SANGAT RENDAH
103	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	54.17	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN LUMAJANG	55.83	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN BLITAR	55.11	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN KEDIRI	55.50	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN PASURUAN	55.87	SANGAT TINGGI
108	BNN KABUPATEN TUBAN	54.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI JAWA TIMUR		54.15	SANGAT TINGGI
17	BNNP KALIMANTAN BARAT	55.59	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	52.02	TINGGI
110	BNN KABUPATEN SINTANG	39.87	SANGAT RENDAH
111	BNN KOTA PONTIANAK	55.79	SANGAT TINGGI
112	BNN KOTA SINGKAWANG	53.51	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
113	BNN KABUPATEN SANGGAU	45.00	SANGAT RENDAH
114	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	48.81	RENDAH
115	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	48.70	RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN BARAT		49.91	TINGGI
18	BNNP KALIMANTAN TENGAH	54.16	SANGAT TINGGI
116	BNN KOTA PALANGKARAYA	55.76	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	55.08	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		55.00	SANGAT TINGGI
19	BNNP KALIMANTAN SELATAN	55.75	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	52.58	TINGGI
119	BNN KOTA BANJARMASIN	53.40	TINGGI
120	BNN KOTA BANJARBARU	55.93	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BALANGAN	51.04	TINGGI
122	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	55.34	SANGAT TINGGI
123	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	50.84	TINGGI
124	BNN KABUPATEN TABALONG	51.31	TINGGI
125	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	54.62	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		53.42	TINGGI
20	BNNP KALIMANTAN TIMUR	55.89	SANGAT TINGGI
126	BNN KOTA BALIKPAPAN	54.67	SANGAT TINGGI
127	BNN KOTA SAMARINDA	52.45	TINGGI
128	BNN KOTA BONTANG	42.46	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		51.37	TINGGI
21	BNNP KALIMANTAN UTARA	55.60	SANGAT TINGGI
129	BNN KOTA TARAKAN	58.30	SANGAT TINGGI
130	BNN KABUPATEN NUNUKAN	56.87	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA		56.92	SANGAT TINGGI
22	BNNP SULAWESI UTARA	51.16	TINGGI
131	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	48.16	RENDAH
132	BNN KOTA BITUNG	49.71	RENDAH
133	BNN KOTA MANADO	38.13	SANGAT RENDAH
134	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	45.27	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI UTARA		46.49	RENDAH
23	BNNP SULAWESI TENGAH	52.27	TINGGI
135	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	44.29	SANGAT RENDAH
136	BNN KABUPATEN MOROWALI	52.20	TINGGI
137	BNN KOTA PALU	41.55	SANGAT RENDAH
138	BNN KABUPATEN DONGGALA	52.05	TINGGI
139	BNN KABUPATEN POSO	51.89	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
140	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	43.40	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGAH		48.23	RENDAH
24	BNNP SULAWESI SELATAN	53.17	TINGGI
141	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	50.11	TINGGI
142	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	50.53	TINGGI
143	BNN KOTA PALOPO	54.52	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI SELATAN		52.08	TINGGI
25	BNNP SULAWESI TENGGARA	54.55	SANGAT TINGGI
144	BNN KABUPATEN MUNA	50.99	TINGGI
145	BNN KABUPATEN KOLAKA	50.22	TINGGI
146	BNN KOTA KENDARI	54.96	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BAU-BAU	56.68	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI TENGGARA		53.48	TINGGI
26	BNNP SULAWESI BARAT	54.67	SANGAT TINGGI
148	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	51.49	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI SULAWESI BARAT		53.08	TINGGI
27	BNNP MALUKU	46.69	RENDAH
149	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	41.04	SANGAT RENDAH
150	BNN KOTA TUAL	54.73	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU		47.49	RENDAH
28	BNNP MALUKU UTARA	54.68	SANGAT TINGGI
151	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	49.67	RENDAH
152	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	55.35	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	50.91	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI MALUKU UTARA		52.66	TINGGI
29	BNNP BALI	55.80	SANGAT TINGGI
154	BNN KOTA DENPASAR	59.17	SANGAT TINGGI
155	BNN KABUPATEN BADUNG	50.41	TINGGI
156	BNN KABUPATEN GIANYAR	47.33	RENDAH
157	BNN KABUPATEN BULELENG	55.71	SANGAT TINGGI
158	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	44.95	SANGAT RENDAH
159	BNN KABUPATEN KARANGASEM	55.86	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI BALI		52.75	TINGGI
30	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	55.73	SANGAT TINGGI
160	BNN KABUPATEN BIMA	54.01	SANGAT TINGGI
161	BNN KOTA MATARAM	55.83	SANGAT TINGGI
162	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	46.26	RENDAH
163	BNN KABUPATEN SUMBAWA	52.70	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52.91	TINGGI

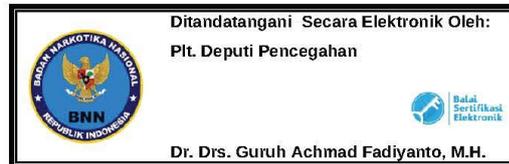
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT Plt. Deputi Pencegahan
 NOMOR :
 B/4224/XII/DE/PC.00/2024/BNN
 TANGGAL : 24 Desember 2024

REKAPITULASI PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARI) TAHUN 2024

NO	NAMA BNNP/BNNK	NILAI DEKTARI	KATEGORI
31	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	55.16	SANGAT TINGGI
164	BNN KABUPATEN BELU	55.55	SANGAT TINGGI
165	BNN KOTA KUPANG	40.98	SANGAT RENDAH
166	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	51.24	TINGGI
RATA-RATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		50.73	TINGGI
32	BNNP GORONTALO	55.06	SANGAT TINGGI
167	BNN KABUPATEN BOALEMO	55.61	SANGAT TINGGI
168	BNN KOTA GORONTALO	52.57	TINGGI
169	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	51.11	TINGGI
170	BNN KABUPATEN GORONTALO	53.37	TINGGI
171	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	56.49	SANGAT TINGGI
RATA-RATA PROVINSI GORONTALO		54.03	SANGAT TINGGI
33	BNNP PAPUA	51.70	TINGGI
172	BNN KABUPATEN MIMIKA	51.58	TINGGI
173	BNN KABUPATEN JAYAPURA	39.24	SANGAT RENDAH
RATA-RATA PROVINSI PAPUA		47.51	RENDAH
34	BNNP PAPUA BARAT	54.58	SANGAT TINGGI
RATA-RATA NILAI TAHUN 2024		52.04	TINGGI

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan
Keluarga terhadap Penyalahgunaan
Narkoba (Dektara) Tahun 2024

Jakarta, 23 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

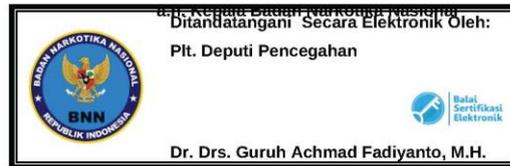
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2024 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orang tua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

- b. Hasil angka penghitungan Dektara Tahun 2024 adalah 86,787 (Kategori Tinggi) dengan target angka 78,70 (Kategori Tinggi), Adapun klasifikasi capaian wilayah sebagai berikut :
- 1) Kategori sangat tinggi (88,31 – 100,00) sebanyak 83 Satuan Kerja
 - 2) Kategori tinggi (76,61 – 88,30) sebanyak 118 Satuan Kerja
 - 3) Kategori rendah (65,00 – 76,60) sebanyak 7 Satuan Kerja
 - 4) Kategori sangat rendah (25,00 – 64,99) sebanyak 0 Satuan Kerja
- Daftar hasil penghitungan terlampir.
3. Berdasarkan dengan butir satu dan dua di atas, diucapkan terima kasih atas partisipasi jajaran Pencegahan dalam Proses Penghitungan Dektara Tahun 2024 dan semoga dapat terus meningkatkan hasil capaian kinerja wilayah pada tahun berikutnya.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
1	BNN PUSAT	84,643	TINGGI
2	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	84,911	TINGGI
3	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	80,446	TINGGI
4	BNN KABUPATEN GAYO LUES	80,357	TINGGI
5	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	80,536	TINGGI
6	BNN KOTA SABANG	95,714	SANGAT TINGGI
7	BNN KOTA LHOSEUMAWE	93,482	SANGAT TINGGI
8	BNN KOTA LANGSA	86,339	TINGGI
9	BNN KABUPATEN BIREUEN	91,429	SANGAT TINGGI
10	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	94,732	SANGAT TINGGI
11	BNN KABUPATEN PIDIE	81,250	TINGGI
12	BNN KOTA BANDA ACEH	79,911	TINGGI
13	BNNP SUMATERA UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
14	BNN KABUPATEN KARO	84,107	TINGGI
15	BNN KOTA BINJAI	89,732	SANGAT TINGGI
16	BNN KOTA TANJUNG BALAI	84,018	TINGGI
17	BNN KOTA GUNUNGSITOLI	85,714	TINGGI
18	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	92,768	SANGAT TINGGI
19	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	81,518	TINGGI
20	BNN KABUPATEN LANGKAT	82,232	TINGGI
21	BNN KABUPATEN ASAHAN	87,054	TINGGI
22	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	87,768	TINGGI
23	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	96,250	SANGAT TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
24	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	90,625	SANGAT TINGGI
25	BNN KOTA TEBING TINGGI	80,179	TINGGI
26	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	77,679	TINGGI
27	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	91,964	SANGAT TINGGI
28	BNN KABUPATEN BATU BARA	78,393	TINGGI
29	BNNP SUMATERA BARAT	86,071	TINGGI
30	BNN KOTA SAWAHLUNTO	81,786	TINGGI
31	BNN KOTA PAYAKUMBUH	95,000	SANGAT TINGGI
32	BNN KABUPATEN SOLOK	88,036	TINGGI
33	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	88,214	TINGGI
34	BNNP RIAU	93,571	SANGAT TINGGI
35	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	94,286	SANGAT TINGGI
36	BNN KABUPATEN PELALAWAN	90,714	SANGAT TINGGI
37	BNN KOTA PEKANBARU	87,054	TINGGI
38	BNN KOTA DUMAI	90,179	SANGAT TINGGI
39	BNNP JAMBI	90,000	SANGAT TINGGI
40	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	85,804	TINGGI
41	BNN KOTA JAMBI	85,982	TINGGI
42	BNN KABUPATEN BATANGHARI	85,268	TINGGI
43	BNNP LAMPUNG	89,821	SANGAT TINGGI
44	BNN KABUPATEN TANGGAMUS	83,304	TINGGI
45	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	89,643	SANGAT TINGGI
46	BNN KOTA METRO	88,125	TINGGI
47	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	90,982	SANGAT TINGGI
48	BNN KABUPATEN WAY KANAN	82,768	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
49	BNNP KEPULAUAN RIAU	93,393	SANGAT TINGGI
50	BNN KABUPATEN KARIMUN	92,679	SANGAT TINGGI
51	BNN KOTA BATAM	85,446	TINGGI
52	BNN KOTA TANJUNG PINANG	93,214	SANGAT TINGGI
53	BNNP SUMATERA SELATAN	83,214	TINGGI
54	BNN KABUPATEN OGAN ILIR	77,411	TINGGI
55	BNN KOTA PAGARALAM	86,696	TINGGI
56	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	95,714	SANGAT TINGGI
57	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	86,696	TINGGI
58	BNN KOTA PRABUMULIH	86,339	TINGGI
59	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	87,768	TINGGI
60	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	81,161	TINGGI
61	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	88,750	SANGAT TINGGI
62	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	88,393	SANGAT TINGGI
63	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	84,732	TINGGI
64	BNN KABUPATEN BANGKA	90,714	SANGAT TINGGI
65	BNN KOTA PANGKAL PINANG	84,107	TINGGI
66	BNN KABUPATEN BELITUNG	82,679	TINGGI
67	BNN KABUPATEN BANGKA SELATAN	93,214	SANGAT TINGGI
68	BNNP BENGKULU	81,518	TINGGI
69	BNN KOTA BENGKULU	92,857	SANGAT TINGGI
70	BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN	83,393	TINGGI
71	BNNP DKI JAKARTA	85,982	TINGGI
72	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	75,982	RENDAH
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	79,286	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
74	BNN KOTA JAKARTA UTARA	93,393	SANGAT TINGGI
75	BNNP BANTEN	91,607	SANGAT TINGGI
76	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	82,054	TINGGI
77	BNN KOTA CILEGON	86,429	TINGGI
78	BNN KOTA TANGERANG	85,179	TINGGI
79	BNNP JAWA BARAT	82,589	TINGGI
80	BNN KABUPATEN BOGOR	96,339	SANGAT TINGGI
81	BNN KABUPATEN CIANJUR	89,018	SANGAT TINGGI
82	BNN KOTA BANDUNG	96,071	SANGAT TINGGI
83	BNN KOTA CIREBON	96,875	SANGAT TINGGI
84	BNN KOTA CIMAHI	91,875	SANGAT TINGGI
85	BNN KABUPATEN SUKABUMI	86,071	TINGGI
86	BNN KABUPATEN GARUT	81,071	TINGGI
87	BNN KABUPATEN KUNINGAN	89,107	SANGAT TINGGI
88	BNN KABUPATEN CIAMIS	89,464	SANGAT TINGGI
89	BNN KOTA DEPOK	88,393	SANGAT TINGGI
90	BNN KABUPATEN KARAWANG	84,018	TINGGI
91	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	78,304	TINGGI
92	BNN KOTA TASIKMALAYA	85,625	TINGGI
93	BNN KABUPATEN SUMEDANG	83,839	TINGGI
94	BNNP JAWA TENGAH	87,321	TINGGI
95	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	84,464	TINGGI
96	BNN KOTA TEGAL	89,107	SANGAT TINGGI
97	BNN KABUPATEN BANYUMAS	91,518	SANGAT TINGGI
98	BNN KABUPATEN CILACAP	86,161	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN KENDAL	86,607	TINGGI
100	BNN KABUPATEN BATANG	93,125	SANGAT TINGGI
101	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	90,268	SANGAT TINGGI
102	BNN KABUPATEN MAGELANG	82,857	TINGGI
103	BNN KOTA SURAKARTA	86,518	TINGGI
104	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	92,679	SANGAT TINGGI
105	BNN KABUPATEN SLEMAN	90,268	SANGAT TINGGI
106	BNN KOTA YOGYAKARTA	93,304	SANGAT TINGGI
107	BNN KABUPATEN BANTUL	92,054	SANGAT TINGGI
108	BNNP JAWA TIMUR	90,179	SANGAT TINGGI
109	BNN KABUPATEN SUMENEP	87,946	TINGGI
110	BNN KOTA MOJOKERTO	81,875	TINGGI
111	BNN KOTA MALANG	82,500	TINGGI
112	BNN KOTA BATU	90,179	SANGAT TINGGI
113	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	90,000	SANGAT TINGGI
114	BNN KABUPATEN NGANJUK	90,446	SANGAT TINGGI
115	BNN KABUPATEN SIDOARJO	84,821	TINGGI
116	BNN KOTA SURABAYA	87,411	TINGGI
117	BNN KOTA KEDIRI	91,696	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN MALANG	94,375	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN GRESIK	87,589	TINGGI
120	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	96,875	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN LUMAJANG	94,821	SANGAT TINGGI
122	BNN KABUPATEN BLITAR	84,286	TINGGI
123	BNN KABUPATEN KEDIRI	85,625	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
124	BNN KABUPATEN PASURUAN	92,321	SANGAT TINGGI
125	BNN KABUPATEN TUBAN	80,268	TINGGI
126	BNNP KALIMANTAN BARAT	92,857	SANGAT TINGGI
127	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	81,429	TINGGI
128	BNN KABUPATEN SINTANG	82,946	TINGGI
129	BNN KOTA PONTIANAK	94,196	SANGAT TINGGI
130	BNN KOTA SINGKAWANG	77,679	TINGGI
131	BNN KABUPATEN SANGGAU	84,554	TINGGI
132	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	89,554	SANGAT TINGGI
133	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	87,768	TINGGI
134	BNNP KALIMANTAN TENGAH	88,661	SANGAT TINGGI
135	BNN KOTA PALANGKARAYA	89,107	SANGAT TINGGI
136	BNN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	95,000	SANGAT TINGGI
137	BNNP KALIMANTAN SELATAN	84,107	TINGGI
138	BNN KABUPATEN BARITO KUALA	90,179	SANGAT TINGGI
139	BNN KOTA BANJARMASIN	96,607	SANGAT TINGGI
140	BNN KOTA BANJARBARU	85,804	TINGGI
141	BNN KABUPATEN BALANGAN	86,518	TINGGI
142	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	82,857	TINGGI
143	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	80,268	TINGGI
144	BNN KABUPATEN TABALONG	86,875	TINGGI
145	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	89,732	SANGAT TINGGI
146	BNNP KALIMANTAN TIMUR	92,589	SANGAT TINGGI
147	BNN KOTA BALIKPAPAN	91,518	SANGAT TINGGI
148	BNN KOTA SAMARINDA	85,179	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
149	BNN KOTA BONTANG	90,804	SANGAT TINGGI
150	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	81,964	TINGGI
151	BNN KABUPATEN BIMA	94,821	SANGAT TINGGI
152	BNN KOTA MATARAM	95,536	SANGAT TINGGI
153	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	99,375	SANGAT TINGGI
154	BNN KABUPATEN SUMBAWA	79,286	TINGGI
155	BNNP KALIMANTAN UTARA	80,179	TINGGI
156	BNN KOTA TARAKAN	94,732	SANGAT TINGGI
157	BNN KABUPATEN NUNUKAN	91,339	SANGAT TINGGI
158	BNNP SULAWESI UTARA	81,786	TINGGI
159	BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	95,982	SANGAT TINGGI
160	BNN KOTA BITUNG	77,589	TINGGI
161	BNN KOTA MANADO	75,804	RENDAH
162	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	95,893	SANGAT TINGGI
163	BNNP SULAWESI TENGAH	84,375	TINGGI
164	BNN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN	80,625	TINGGI
165	BNN KABUPATEN MOROWALI	76,964	TINGGI
166	BNN KOTA PALU	82,143	TINGGI
167	BNN KABUPATEN DONGGALA	77,411	TINGGI
168	BNN KABUPATEN POSO	70,625	RENDAH
169	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	81,696	TINGGI
170	BNNP SULAWESI SELATAN	82,321	TINGGI
171	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	95,179	SANGAT TINGGI
172	BNN KABUPATEN BONE	79,821	TINGGI
173	BNN KOTA PALOPO	88,304	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

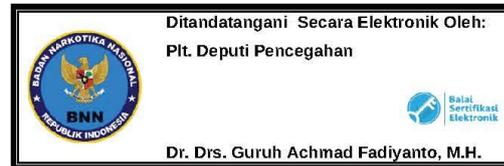
LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
174	BNNP SULAWESI TENGGARA	77,589	TINGGI
175	BNN KABUPATEN MUNA	80,804	TINGGI
176	BNN KABUPATEN KOLAKA	86,786	TINGGI
177	BNN KOTA KENDARI	75,982	RENDAH
178	BNN KOTA BAU-BAU	82,321	TINGGI
179	BNNP SULAWESI BARAT	85,357	TINGGI
180	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	83,125	TINGGI
181	BNNP MALUKU	84,464	TINGGI
182	BNN KABUPATEN BURU SELATAN	83,482	TINGGI
183	BNN KOTA TUAL	79,732	TINGGI
184	BNNP MALUKU UTARA	88,482	SANGAT TINGGI
185	BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI	76,429	RENDAH
186	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	75,893	RENDAH
187	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	75,179	RENDAH
188	BNNP BALI	84,375	TINGGI
189	BNN KOTA DENPASAR	84,821	TINGGI
190	BNN KABUPATEN BADUNG	94,375	SANGAT TINGGI
191	BNN KABUPATEN GIANYAR	93,839	SANGAT TINGGI
192	BNN KABUPATEN BULELENG	90,179	SANGAT TINGGI
193	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	90,446	SANGAT TINGGI
194	BNN KABUPATEN KARANGASEM	86,518	TINGGI
195	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	88,929	SANGAT TINGGI
196	BNN KABUPATEN BELU	76,696	TINGGI
197	BNN KOTA KUPANG	84,375	TINGGI
198	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	85,893	TINGGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

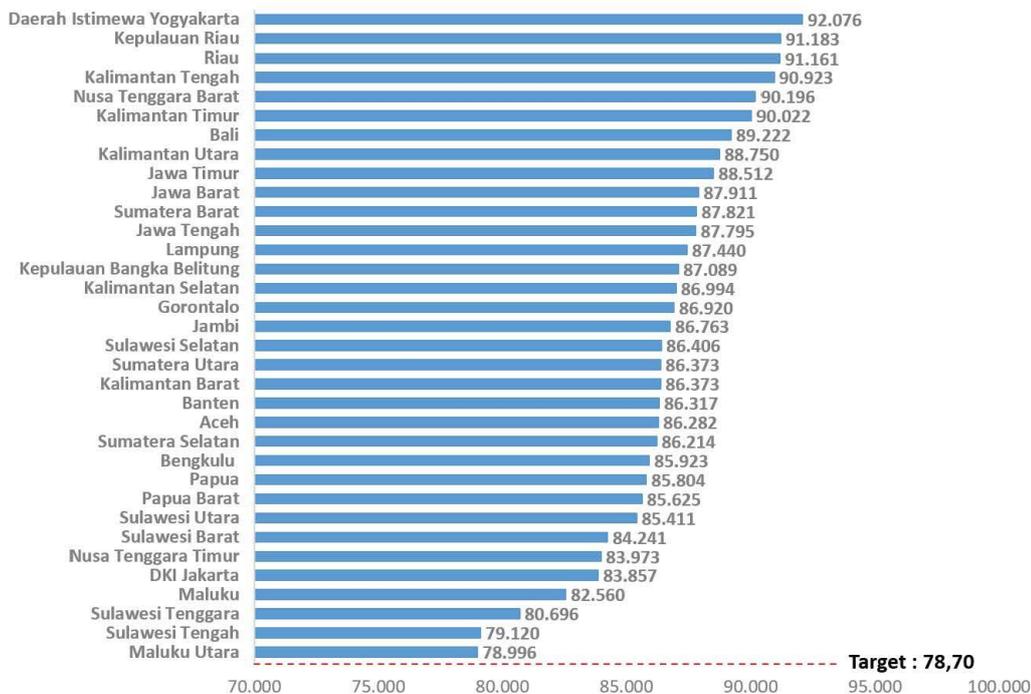
NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
199	BNNP GORONTALO	87,946	TINGGI
200	BNN KABUPATEN BOALEMO	79,911	TINGGI
201	BNN KOTA GORONTALO	88,036	TINGGI
202	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	85,179	TINGGI
203	BNN KABUPATEN GORONTALO	85,982	TINGGI
204	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	94,464	SANGAT TINGGI
205	BNNP PAPUA	85,268	TINGGI
206	BNN KABUPATEN MIMIKA	90,089	SANGAT TINGGI
207	BNN KABUPATEN JAYAPURA	82,054	TINGGI
208	BNNP PAPUA BARAT	85,625	TINGGI
NILAI DEKTARA TAHUN 2024		86,787	TINGGI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN II
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4201/XII/DE/PC.01/2024/BNN
 TANGGAL : 23 Desember 2024

**GRAFIK HASIL PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN KELUARGA
 TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DEKTARA) TAHUN 2024**



a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Plt. Deputy Pencegahan

Dr. Drs. Guruh Achmad Fadiyanto, M.H.

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2024

Jakarta, 11 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di
tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Program Kerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2024 yang dilaksanakan pada Penganjur P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.
3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari BNNP dan BNNK yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



HASIL PENGUKURAN INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI (IKP) TAHUN 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
1	BNNP ACEH	3,32	0	3,29	0	3,31	Sangat Mandiri	A
2	BNNK SABANG	3,86	0	0	3,76	3,81	Sangat Mandiri	A
3	BNNK PIDIE JAYA	3,59	0	3,64	0	3,62	Sangat Mandiri	A
4	BNNK PIDIE	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
5	BNNK GAYO LUES	0	0	3,37	3,49	3,43	Sangat Mandiri	A
6	BNNK BIREUEN	3,27	0	0	3,37	3,32	Sangat Mandiri	A
7	BNNK BANDA ACEH	3,47	0	0	3,84	3,66	Sangat Mandiri	A
8	BNNK ACEH TAMIANG	3,72	0	0	3,67	3,70	Sangat Mandiri	A
9	BNNK ACEH SELATAN	3,33	0	3,28	0	3,31	Sangat Mandiri	A
10	BNN KOTA LHKOSEUMAWE	3,84	0	3,68	0	3,76	Sangat Mandiri	A
11	BNN KOTA LANGSA	3,67	0	3,78	0	3,73	Sangat Mandiri	A
12	BNNP SUMATERA BARAT	0	0	3,69	3,76	3,73	Sangat Mandiri	A
13	BNNK SOLOK	0	0	3,77	3,8	3,79	Sangat Mandiri	A
14	BNNK SAWAHLUNTO	3,6	0	0	3,86	3,73	Sangat Mandiri	A
15	BNNK PAYAKUMBUH	0	0	3,83	3,86	3,85	Sangat Mandiri	A
16	BNNK PASAMAN BARAT	0	0	3,81	3,86	3,84	Sangat Mandiri	A
17	BNNP SUMUT	0	0	3,53	3,6	3,57	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
18	BNNK TEBING TINGGI	0	0	3,383	3,451	3,42	Sangat Mandiri	A
19	BNNK TAPANULI SELATAN	3,79	3,67	0	0	3,73	Sangat Mandiri	A
20	BNNK T.J. BALAI	0	0	3,4	3,73	3,57	Sangat Mandiri	A
21	BNNK SIMALUNGUN	0	3,48	0	3,54	3,51	Sangat Mandiri	A
22	BNNK SERDANG BEDAGAI	0	0	3,45	3,17	3,31	Sangat Mandiri	A
23	BNNK PEMATANG SIANTAR	3,428	0	0	3,434	3,43	Sangat Mandiri	A
24	BNNK LANGKAT	0	0	3,47	3,55	3,51	Sangat Mandiri	A
25	BNNK MANDAILING NATAL	0	0	3,5	3,55	3,53	Sangat Mandiri	A
26	BNNK LABUHAN BATU UTARA	3,4368	0	0	3,6224	3,53	Sangat Mandiri	A
27	BNNK KARO	0	0	3,32	3,708	3,51	Sangat Mandiri	A
28	BNNK GUNUNGSITOLI	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
29	BNNK DELI SERDANG	3,76	0	0	3,7	3,73	Sangat Mandiri	A
30	BNNK BINJAI	0	0	3,68	3,53	3,61	Sangat Mandiri	A
31	BNNK BATUBARA	3,84	0	0	3,8	3,82	Sangat Mandiri	A
32	BNNK ASAHAN	0	0	3,41	3,43	3,42	Sangat Mandiri	A
33	BNNP SUMSEL	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
34	BNNK PRABUMULIH	3,92	0	0	3,88	3,90	Sangat Mandiri	A
35	BNNK PAGAR ALAM	0	0	3,54	3,53	3,54	Sangat Mandiri	A
36	BNNK OKU TIMUR	3,73	0	0	3,61	3,67	Sangat Mandiri	A
37	BNNK OGAN KOMERING ILIR	3,88	0	0	3,51	3,70	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
38	BNNK OGAN ILIR	3,44	0	0	3,48	3,46	Sangat Mandiri	A
39	BNNK MUARA ENIM	3,68	0	0	3,67	3,68	Sangat Mandiri	A
40	BNNK LUBUKLINGGAU	0	0	3,73	3,86	3,80	Sangat Mandiri	A
41	BNNK EMPAT LAWANG	3,75	0	0	3,53	3,64	Sangat Mandiri	A
42	BNN KAB MUSI RAWAS	0	0	3,48	3,36	3,42	Sangat Mandiri	A
43	BNNP LAMPUNG	3,32	0	0	3,56	3,44	Sangat Mandiri	A
44	BNNK WAY KANAN	3,56	0	0	3,54	3,55	Sangat Mandiri	A
45	BNNK TANGGAMUS	3,54	0	0	3,94	3,74	Sangat Mandiri	A
46	BNNK LAMPUNG TIMUR	3,25	0	3,47	0	3,36	Sangat Mandiri	A
47	BNNK LAMPUNG SELATAN	3,6	0	3,56	0	3,58	Sangat Mandiri	A
48	BNN KOTA METRO	3,62	0	0	3,53	3,58	Sangat Mandiri	A
49	BNNP RIAU	3,7	0	0	3,67	3,69	Sangat Mandiri	A
50	BNNK PELALAWAN	3,66	0	0	3,76	3,71	Sangat Mandiri	A
51	BNNK PEKAN BARU	3,9	0	0	3,8	3,85	Sangat Mandiri	A
52	BNNK KUANTAN SINGINGI	0	0	3,8	3,92	3,86	Sangat Mandiri	A
53	BNN KOTA DUMAI	4	0	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
54	BNNP KEP. RIAU	0	4	0	4	4,00	Sangat Mandiri	A
55	BNNK TANJUNGPINANG	0	0	3,68	3,778	3,73	Sangat Mandiri	A
56	BNNK KARIMUN	0	0	3,96	3,84	3,90	Sangat Mandiri	A
57	BNN KOTA BATAM	0	0	3,94	3,95	3,95	Sangat Mandiri	A
58	BNNP JAMBI	3,616	3,765	0	0	3,69	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
59	BNNK TANJAB TIMUR	3,88	0	0	4	3,71	Sangat Mandiri	A
60	BNN KOTA JAMBI	3,93	0	0	3,85	3,89	Sangat Mandiri	A
61	BNNK BATANGHARI	3,62	0	0	3,58	3,60	Sangat Mandiri	A
62	BNNP BABEL	3,381	0	0	3,397	3,39	Sangat Mandiri	A
63	BNNK PANGKALPINANG	0	0	3,7	3,5	3,60	Sangat Mandiri	A
64	BNNK BELITUNG	3,55	0	0	3,2	3,38	Sangat Mandiri	A
65	BNNK BANGKA SELATAN	0	0	3,96	3,96	3,96	Sangat Mandiri	A
66	BNNK BANGKA	3,62	0	3,7	0	3,66	Sangat Mandiri	A
67	BNNP BENGKULU	3,59	0	0	3,73	3,66	Sangat Mandiri	A
68	BNNK BENGKULU SELATAN	3,8	0	0	3,5	3,65	Sangat Mandiri	A
69	BNNK BENGKULU	0	0	3,69	3,49	3,59	Sangat Mandiri	A
70	BNNP DKI JAKARTA	3,05	0	0	3,52	3,29	Sangat Mandiri	A
71	BNNK JAKARTA SELATAN	3,24	0	2,81	0	3,03	Mandiri	B
72	BNN KOTA JAKARTA UTARA	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
73	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	3,55	0	0	3,67	3,61	Sangat Mandiri	A
74	BNNP BANTEN	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	0	0	3,74	3,36	3,55	Sangat Mandiri	A
76	BNN KOTA TANGERANG	0	0	3,39	3,32	3,36	Sangat Mandiri	A
77	BNN KOTA CILEGON	3,67	0	3,63	0	3,65	Sangat Mandiri	A
78	BNNP JAWA BARAT	0	3,52	0	3,54	3,53	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
79	BNNK SUMEDANG	3,75	3,67	0	0	3,71	Sangat Mandiri	A
80	BNNK SUKABUMI	3,83	0	0	3,83	3,83	Sangat Mandiri	A
81	BNNK KARAWANG	3,8	0	0	3,4	3,60	Sangat Mandiri	A
82	BNNK GARUT	0	3,78	0	3,78	3,78	Sangat Mandiri	A
83	BNNK CIMAH	3,65	0	0	3,45	3,55	Sangat Mandiri	A
84	BNNK CIANJUR	3,52	0	0	3,5	3,51	Sangat Mandiri	A
85	BNNK CIAMIS	3,6	0	0	3,57	3,59	Sangat Mandiri	A
86	BNNK BANDUNG BARAT	3,65	0	3,87	0	3,76	Sangat Mandiri	A
87	BNN KOTA TASIKMALAYA	3,56	0	3,8	0	3,68	Sangat Mandiri	A
88	BNN KOTA DEPOK	0	0	3,58	3,66	3,62	Sangat Mandiri	A
89	BNN KOTA CIREBON	3,88	0	0	3,93	3,91	Sangat Mandiri	A
90	BNN KOTA BANDUNG	3,8	0	0	3,43	3,80	Sangat Mandiri	A
91	BNN KABUPATEN BOGOR	3,4	0	0	3,59	3,50	Sangat Mandiri	A
92	BNNK KUNINGAN	3,345	0	0	3,32	3,33	Sangat Mandiri	A
93	BNNP JAWA TENGAH	3,78	0	3,46	0	3,62	Sangat Mandiri	A
94	BNNK TEMANGGUNG	0	0	4	4	4,00	Sangat Mandiri	A
95	BNNK TEGAL	0	3,36	0	3,36	3,36	Sangat Mandiri	A
96	BNNK PURBALINGGA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A
97	BNNK MAGELANG	0	0	3,72	3,64	3,68	Sangat Mandiri	A
98	BNNK CILACAP	0	3,52	0	3,48	3,50	Sangat Mandiri	A
99	BNNK BATANG	3,46	0	3,4	0	3,43	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
100	BNNK BANYUMAS	0	0	3,64	3,61	3,63	Sangat Mandiri	A
101	BNN KOTA SURAKARTA	3,42	0	0	3,52	3,47	Sangat Mandiri	A
102	BNN KAB. KENDAL	3,71	0	0	3,84	3,78	Sangat Mandiri	A
103	BNNP JAWA TIMUR	3,69	0	0	3,62	3,66	Sangat Mandiri	A
104	BNNK TULUNG AGUNG	3,73	0	0	4	3,87	Sangat Mandiri	A
105	BNNK TUBAN	3,55	0	3,71	0	3,63	Sangat Mandiri	A
106	BNNK TRENGGALEK	3,6	0	0	3,5	3,55	Sangat Mandiri	A
107	BNNK SUMENEP	0	0	3,68	2,96	3,32	Sangat Mandiri	A
108	BNNK SIDOARJO	0	0	3,84	3,76	3,80	Sangat Mandiri	A
109	BNNK PASURUAN	0	0	3,88	3,76	3,82	Sangat Mandiri	A
110	BNNK NGANJUK	3,54	0	3,88	0	3,71	Sangat Mandiri	A
111	BNNK MOJOKERTO	3,29	0	3,34	0	3,32	Sangat Mandiri	A
112	BNN KAB MALANG	3,72	0	0	3,72	3,72	Sangat Mandiri	A
113	BNNK LUMAJANG	3,56	0	0	3,56	3,56	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
11 4	BNNKAB KEDIRI	0	0	3,84	3,2	3,52	Sangat Mandiri	A
11 5	BNNK GRESIK	4	0	3,92	0	3,96	Sangat Mandiri	A
11 6	BNNK BLITAR	3,47	0	0	3,344	3,41	Sangat Mandiri	A
11 7	BNN KOTA SURABAYA	0	0	3,76	3,76	3,76	Sangat Mandiri	A
11 8	BNN KOTA MALANG	0	0	3,26	3,78	3,52	Sangat Mandiri	A
11 9	BNN KOTA KEDIRI	3,84	0	3,8	0	3,82	Sangat Mandiri	A
12 0	BNN KOTA BATU	3,52	0	0	3,72	3,62	Sangat Mandiri	A
12 1	BNNP D.I. YOGYAKARTA	3,66	0	3,59	0	3,63	Sangat Mandiri	A
12 2	BNNK SLEMAN	0	0	3,46	3,53	3,50	Sangat Mandiri	A
12 3	BNNK BANTUL	0	0	3,71	3,76	3,74	Sangat Mandiri	A
12 4	BNN KOTA YOGYAKARTA	0	0	3,69	3,56	3,63	Sangat Mandiri	A
12 5	BNNP BALI	0	3,79	0	3,55	3,67	Sangat Mandiri	A
12 6	BNNK KLUNGKUNG	3,47	0	3,96	0	3,72	Sangat Mandiri	A
12 7	BNNK KARANGSEM	3,48	0	3,32	0	3,40	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
12 8	BNNK GIANYAR	3,96	3,88	0	0	3,92	Sangat Mandiri	A
12 9	BNN KOTA DENPASAR	0	0	3,3	3,3	3,30	Sangat Mandiri	A
13 0	BNN KABUPATEN BADUNG	3,93	3,87	0	0	3,90	Sangat Mandiri	A
13 1	BNN KAB BULELENG	3,35	0	3,64	0	3,50	Sangat Mandiri	A
13 2	BNNP NTB	0	0	3,4	3,3	3,35	Sangat Mandiri	A
13 3	BNNK SUMBAWA BARAT	0	0	3,57	3,52	3,55	Sangat Mandiri	A
13 4	BNNK SUMBAWA	3,33	0	3,74	0	3,54	Sangat Mandiri	A
13 5	BNNK MATARAM	3,92	0	0	3,84	3,88	Sangat Mandiri	A
13 6	BNNK BIMA	3,74	0	3,8	0	3,77	Sangat Mandiri	A
13 7	BNNP NTT	3,47	0	0	3,48	3,48	Sangat Mandiri	A
13 8	BNNK KOTA KUPANG	3,69	0	0	3,39	3,54	Sangat Mandiri	A
13 9	BNNK BELU	0	0	3,62	3,36	3,49	Sangat Mandiri	A
14 0	BNN KAB. ROTE NDAO	0	0	3,34	3,37	3,36	Sangat Mandiri	A
14 1	BNNP KALIMANTAN BARAT	3,43	0	0	3,42	3,43	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
142	BNNK SINTANG	3,06	0	0	3,4	3,23	Mandiri	B
143	BNNK SANGGAU	3,86	0	0	4,05	3,96	Sangat Mandiri	A
144	BNNK PONTIANAK	0	0	3,86	3,64	3,75	Sangat Mandiri	A
145	BNNK MEMPAWAH	0	0	3,36	3,382	3,37	Sangat Mandiri	A
146	BNN KOTA SINGKAWANG	0	0	3,6	3,54	3,57	Sangat Mandiri	A
147	BNN KAB. KUBU RAYA	0	0	3,43	3,46	3,45	Sangat Mandiri	A
148	BNN KAB BENGKAYANG	0	0	3,45	3,73	3,59	Sangat Mandiri	A
149	BNNP KALIMANTAN SELATAN	3,4	0	3,2	0	3,30	Sangat Mandiri	A
150	BNNK TANAH LAUT	3,45	0	0	3,38	3,42	Sangat Mandiri	A
151	BNNK TABALONG	0	0	3,71	3,04	3,38	Sangat Mandiri	A
152	BNNK HULU SUNGAI UTARA	0	0	3,36	3,28	3,32	Sangat Mandiri	A
153	BNNK HULU SUNGAI SELATAN	0	0	3,68	3,64	3,66	Sangat Mandiri	A
154	BNNK BARITO KUALA	2,75	0	3,29	0	3,02	Mandiri	B
155	BNNK BANJARMASIN	3,62	0	0	3,78	3,70	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATEGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
156	BNNK BANJARBARU	0	0	3,55	3,92	3,74	Sangat Mandiri	A
157	BNNK BALANGAN	0	0	3,33	3,4	3,37	Sangat Mandiri	A
158	BNNP KALIMANTAN TENGAH	3,52	0	0	3,6	3,56	Sangat Mandiri	A
159	BNNK PALANGKA RAYA	0	0	3,56	3,52	3,54	Sangat Mandiri	A
160	BNNK KOTAWARINGIN BARAT	0	0	4	3,88	3,94	Sangat Mandiri	A
161	BNNP KALIMANTAN TIMUR	3,7	0	3,68	0	3,69	Sangat Mandiri	A
162	BNNK SAMARINDA	3,75	0	3,62	0	3,69	Sangat Mandiri	A
163	BNNK BALIKPAPAN	3,64	0	3,76	0	3,70	Sangat Mandiri	A
164	BNN KOTA BONTANG	3,48	3,82	0	0	3,65	Sangat Mandiri	A
165	BNNP KALIMANTAN UTARA	0	0	3,56	3,57	3,57	Sangat Mandiri	A
166	BNNK TARAKAN	3,22	3,42	0	0	3,32	Sangat Mandiri	A
167	BNNK NUNUKAN	3,34	0	3,29	0	3,32	Sangat Mandiri	A
168	BNNP SULAWESI BARAT	3,24	0	0	3,47	3,36	Sangat Mandiri	A
169	BNNK POLEWALI MANDAR	3,6	0	0	3,6	3,60	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
170	BNNP SULAWESI TENGGARA	3,38	0	0	3,59	3,49	Sangat Mandiri	A
171	BNNK KOLAKA	3,79	0	0	3,98	3,89	Sangat Mandiri	A
172	BNNK BAU BAU	3,85	0	0	3,96	3,91	Sangat Mandiri	A
173	BNN KOTA KENDARI	0	0	3,45	3,99	3,72	Sangat Mandiri	A
174	BNNK MUNA	0	0	3,69	3,7	3,70	Sangat Mandiri	A
175	BNNP SULAWESI SELATAN	3,62	3,25	0	0	3,44	Sangat Mandiri	A
176	BNN KOTA PALOPO	0	0	3,36	3,87	3,62	Sangat Mandiri	A
177	BNNK TANA TORAJA	0	0	3,89	3,92	3,91	Sangat Mandiri	A
178	BNNK BONE	3,88	0	0	3,17	3,53	Sangat Mandiri	A
179	BNNP SULAWESI TENGAH	3,65	0	0	2,99	3,32	Sangat Mandiri	A
180	BNNK PALU	3,68	0	3,72	0	3,70	Sangat Mandiri	A
181	BNNK DONGGALA	3,84	0	0	4	3,92	Sangat Mandiri	A
182	BNNK BANGGAI KEP	0	0	3,82	3,53	3,68	Sangat Mandiri	A
183	BNN KAB TOJO UNA-UNA	3,4	0	0	3,41	3,41	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
184	BNN KAB POSO	3,27	0	0	3,76	3,52	Sangat Mandiri	A
185	BNN KAB MOROWALI	3,41	0	0	3,55	3,48	Sangat Mandiri	A
186	BNNP SULAWESI UTARA	2,93	0	0	3,07	3,00	Mandiri	B
187	BNNK BOLAANG MONGONDOW	3,68	0	3,12	0	3,40	Sangat Mandiri	A
188	BNN KOTA BITUNG	0	0	3	3,44	3,22	Mandiri	B
189	BNN KOTA MANADO	3,68	0	0	3,12	3,40	Sangat Mandiri	A
190	BNNK KEPULAUAN SANGIHE	3,42	0	0	3,4	3,41	Sangat Mandiri	A
191	BNNP GORONTALO	3,27	0	0	3,85	3,56	Sangat Mandiri	A
192	BNN KOTA GORONTALO	3,41	0	0	3,81	3,61	Sangat Mandiri	A
193	BNNK BONE BOLANGO	3,74	0	3,45	0	3,60	Sangat Mandiri	A
194	BNN KAB GORONTALO	3,75	0	3,76	0	3,76	Sangat Mandiri	A
195	BNNK GORONTALO UTARA	3,54	0	3,57	0	3,56	Sangat Mandiri	A
196	BNNK BOALEMO	3,44	0	0	3,54	3,49	Sangat Mandiri	A
197	BNNP MALUKU	3,12	0	3,08	0	3,10	Mandiri	B

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 11 Desember 2024

NO	SATKER	HASIL IKP				INDEKS	KATERGORI	MUTU
		PEMERINTAH	SWAST A	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
19 8	BNNK TUAL	3,51	0	0	3,21	3,36	Sangat Mandiri	A
19 9	BNNK BURU SELATAN	3,53	0	0	3,25	3,39	Sangat Mandiri	A
20 0	BNNP MALUKU UTARA	0	0	3,69	3,57	3,63	Sangat Mandiri	A
20 1	BNNK PULAU MOROTAI	0	0	3,8	3,04	3,42	Sangat Mandiri	A
20 2	BNNK HALMAHERA UTARA	3,92	0	3,84	0	3,88	Sangat Mandiri	A
20 3	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	3,52	0	0	3,2	3,36	Sangat Mandiri	A
20 4	BNNP PAPUA	3,29	0	3,3	0	3,30	Sangat Mandiri	A
20 5	BNNK MIMIKA	3,35	0	0	3,25	3,30	Sangat Mandiri	A
20 6	BNNK JAYAPURA	0	0	3,31	3,31	3,31	Sangat Mandiri	A
20 7	BNNP PAPUA BARAT	3,48	0	0	3,45	3,47	Sangat Mandiri	A
TOTAL						3,59	Sangat Mandiri	A

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4050/XII/DE/PM.00/2024/BNN
 TANGGAL : 11 Desember 2024

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/9//DE/PM.01/2025/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 6 Lembar
Perihal : Hasil Pengukuran IKRN di Wilayah
Program Pemberdayaan Alternatif

Jakarta, 03 Januari 2025

Kepada

Yth. **Kepala BNN Provinsi**

di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Program Kerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN T.A. 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kawasan Rawan Narkoba (IKRN) tahun 2024 melalui jajaran P2M BNN Provinsi dan BNNK Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program Pemberdayaan Alternatif pada Kawasan Rawan Narkoba.
3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKRN terlampir dengan masing-masing wilayah yang diintervensi program pemberdayaan alternatif BNNP dan BNNK, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Alternatif di tahun selanjutnya.

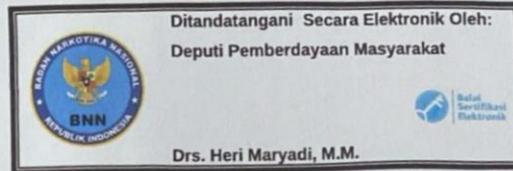
/4. Demikian ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dipindai dengan
CamScanner

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dipindai dengan
CamScanner

**HASIL PENGUKURAN IKRN DI WILAYAH PROGRAM
PEMBERDAYAAN ALTERNATIF TAHUN 2024**

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
1	BNNP Aceh	Desa Meunasah Baktrieng, Kec Barona Jaya, Aceh Besar	Waspada	3.45	Siaga
		Gampong Meurah Kec Seulimum, Kab Aceh Besar	Bahaya	3.54	Siaga
		Gampong Mureu Baro Kec Indrapuri Kab Aceh Besar	Bahaya	3.70	Siaga
2	BNNK Gayo Lues	Desa Beranang, Kec. Kuta Panjang	Waspada	3.43	Siaga
		Desa Kutelintang, Kec. Blangkejeren	Waspada	3.66	Aman
		Desa Penosan Kec. Blangjerango	Waspada	3.71	Aman
		Desa Bukit Kec. Blangkajeren, Kab. Gayo Lues	Waspada	3.29	Aman
		Desa Pertik Kec. Pining Kab. Gayo Lues	Waspada	3.80	Siaga
3	BNNK Lhokseumawe	Gampong Sawang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.18	Siaga
		Gampong Teupin Reusep Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.54	Aman
		Gampong Blang Manyak Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.85	Siaga
		Gampong Riseh Tunong Kec. Sawang Kab. Aceh Utara	Waspada	3.76	Siaga
4	BNNK Bireuen	Pase Kec. Juli Kab. Bireuen	Waspada	3.18	Siaga
		Cot Bada Kec. Jeumpa Kab. Bireuen	Waspada	3.54	Aman
		Seubok Meujim-jim Kec. Juli Kab. Bireuen	Waspada	3.85	Siaga

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/9/II/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Bale Me Kec. Kutablang Kab. Bireuen	Waspada	3.76	Siaga
5	BNNP Sumatera Utara	Kel. Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan	Bahaya	3.64	Aman
		Kel. Tanjung Mulia Kec. Medan Deli Kota Medan	Bahaya	3.38	Siaga
6	BNNP Sumatera Barat	Desa Balai Naras, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman, Prov. Sumatera Barat	Bahaya	3.66	Siaga
7	BNNP Sumatera Selatan	Desa Gasing, Kec. Tatang Kelapa, Kab. Banyuasin	Bahaya	3.73	Siaga
		Kel. Sukarami Kec Sukarami, Kota Palembang	Waspada	3.76	Siaga
8	BNNP Lampung	Desa Kibang, Kec. Metro Kibang, Kab. Lampung Timur	Bahaya	3.47	Aman
9	BNNP Riau	Kel. Bagan Hulu, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau	Bahaya	3.87	Aman
10	BNNP Kepulauan Riau	Kel. Sungai Pasir, Kec. Meral Kab. Tanjung Balai Karimun, Prov. Kepri	Bahaya	3.39	Siaga
11	BNNP Bengkulu	Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu	Waspada	3.52	Aman
12	BNNP DKI Jakarta	Kel. Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Jakarta Barat	Bahaya	3.80	Aman
13	BNNP Jawa Tengah	Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang Prov Jawa Tengah	Bahaya	3.58	Siaga
14	BNNP Jawa Barat	Desa Sukatani Kec. Sukatani Kab. Purwakarta	Bahaya	3.74	Aman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Diambil dengan
CamScanner

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/9/II/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Desa Pangandaran, Kec. Pangandaran, Kab Pangandaran	Waspada	3.76	Aman
15	BNNK Sukabumi	Desa Cibolang. Kec. Cisaat Kab. Sukabumi	Bahaya	3.29	Siaga
16	BNNP Jawa Timur	Desa Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan	Bahaya	3.67	Aman
		Desa Randubango, Kec. Mojosari, Kab. Mojokerto	Waspada	3.66	Aman
17	BNNK Sidoarjo	Desa Banjarkemantren, Kec. Buduran Kab. Sidoarjo	Waspada	2.96	Waspada
18	BNNP Kalimantan Barat	Desa Suka harja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Prov Kalimantan Barat	Bahaya	3.37	Aman
		Kel. Dalam Bugis Pontianak, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	Bahaya	3.28	Aman
		Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota Pontianak	Siaga	3.50	Aman
		kel. Sungai Beliung Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak	Waspada	3.40	Aman
		Desa Kapur. Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya	Bahaya	3.58	Aman
		Kel. Sungai Pinyuh kec. Sungai Pinyuh, Kab. Mempawah	Siaga	3.71	Siaga
		Kel. Roban Singkawang	Bahaya	4.17	Aman
		Kel. Condong Singkawang	Waspada	3.66	Aman
		Kel. Sedau Singkawang	Bahaya	3.26	Aman
		Kel. Sungai Garam Hilir Singkawang	Siaga	3.58	Siaga
		Desa Jagoi Bengkayang	Bahaya	3.45	Aman
		Desa Pulau Lemukutan Bengkayang	Bahaya	2.79	Waspada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dipindai dengan
CamScanner

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/9/I/DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
19	BNNP Kalimantan Tengah	Kel. Baamang Barat Kecamatan Baamang Kab. Kotawaringin Timur	Bahaya	3.78	Aman
20	BNNP Kalimantan Selatan	Kel. Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin	Bahaya	3.47	Aman
		Kel. Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	Bahaya	3.47	Aman
21	BNNP Sulawesi Utara	Kel. Airmadidi Atas, Kec. Airmadidi, Kab. Minahasa Utara, Prov Sulawesi Utara	Bahaya	3.29	Aman
22	BNNP Sulawesi Tengah	Desa Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi	Bahaya	3.58	Siaga
23	BNNP Sulawesi Selatan	Desa Panakkukang, Kec. Pallangga Kab Gowa Prov Sulsel	Waspada	3.44	Siaga
24	BNNP Sulawesi Tenggara	Kel. Baruga, Kec. Baruga Kota Kendari, Prov Sulawesi Tenggara	Waspada	3.63	Siaga
25	BNNP Maluku Utara	Kel. Mangga Dua Kec. Ternate Selatan Kota Ternate	Waspada	3.58	Siaga
26	BNNP Nusa Tenggara Barat	Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara	Waspada	3.38	Aman
27	BNNP Bali	Desa Banjar Anyar, Kec. Kediri, Kab. Tabanan	Waspada	-	-
		Desa Kediri, Kec. Kediri, Kab. Tabanan	Waspada	-	-
28	BNNK Badung	Desa Mengwitani, Kec. Mengwi	Waspada	3.55	Aman
		Kel. Kerobokan Kaja, Kec. Kuta Utara	Waspada	3.65	Aman
29	BNNP Banten	Kel. Banten, Kec. Kasemen, Kota Serang	Waspada	3.70	Siaga
30	BNNP Bangka Belitung	Desa Belo Laut, Kec. Mentok, Kab. Bangka Barat	Waspada	3.48	Aman
		Desa Air Putih, Kec. Mentok Kab. Bangka Barat	Waspada	2.86	Waspada
31	BNNP Kalimantan Timur	Kel. Petung, Kec. Penajam, Kab. Penajam Pasir Utara,	Bahaya	3.70	Siaga
32	BNNP Maluku	Kel. Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kab. Ambon	Waspada	-	-
33	BNNP Gorontalo	Desa Ayula Utara Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango	Waspada	3.58	Aman

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dipindai dengan
CamScanner

LAMPIRAN
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/9//DE/PM.01/2025/BNN
 TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Desa Ayula Timur Kec. Bulango Selatan, Kab. Bone Bulango	Waspada	3.53	Aman
34	BNNP Papua	Kel. Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura	Waspada	3.41	Aman
35	Direktorat Pemberdayaan Alternatif	Desa Sepanjang Kec. Gondanglegi Kab. Malang, Jawa Timur	Bahaya	3.68	Aman
		Kel. Pasir Gintung Kec. Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung	Bahaya	3.20	Siaga
		Kel. Bontorannu, Kec. Mariso, Sulawesi Selatan	Waspada	3.14	Siaga
		Kel. Buluh Kasap, Kec Dumai Timur, Kota Dumai, Riau	Bahaya	3.27	Aman
		Kel. Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumut	Bahaya	3.38	Siaga
		Kel Selat Tanjung Medan, Kec. Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, Sumut	Bahaya	3.26	Aman
		Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli, Sumut	Bahaya	3.65	Aman
		Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Kepri	Bahaya	3.48	Siaga
		Kel. Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumut	Waspada	3.42	Aman
		Desa Amis, Kec. Cikedung, Indramayu, Jabar	Bahaya	2.31	Waspada

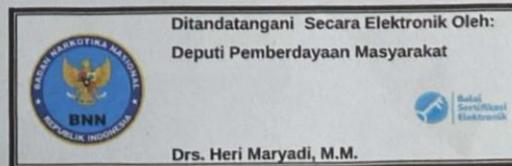
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/9/II/DE/PM.01/2025/BNN
TANGGAL : 03 Januari 2025

No	Satuan Kerja	Nama Kawasan	Status Kerawanan Awal	Nilai IKRN	Status Kerawanan Akhir
		Desa Tugu, Kec. Lelea, Indramayu, Jabar	Bahaya	3.69	Aman
		Desa Tunggul Payung, Kec. Lelea, Indramayu, Jabar	Bahaya	3.50	Siaga
		Desa Sungsang III, Kec. Banyuasin II Kab Banyuasin, Sumsel	Waspada	3.47	Aman
		Desa Jurong, Kec. Sawang, Aceh Utara, Aceh	Waspada	3.63	Siaga
		Desa Pardomuan Kec Panyabungan Timur Kab Madina, Sumut	Bahaya	3.10	Siaga
		Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat	Bahaya	3.28	Aman
		Kelurahan Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, Kalimantan Barat	Bahaya	3.37	Aman
		Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Waspada	2.89	Siaga

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Digitized dengan CamScanner

Capaian IKM Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan Klinik Pratama Pulih Abadi BNNP Kalbar Tahun 2024

Peta Skor IKM Layanan Rehabilitasi Narkotika BNN



Kesimpulan

Kepuasan layanan rehabilitasi BNN pada Klinik/UPT Klinik Pratama Pulih Abadi BNNP Kalbar memenuhi kategori **Baik (B)**. Berdasarkan unsur kepuasan layanan yang dinilai, semua unsur layanan agar dipertahankan kualitasnya.

Kategori IKM

3,533 - 4,000 = Sangat Baik (A)
 3,065 - 3,532 = Baik (B)
 2,599 - 3,064 = Kurang Baik (C)
 1,000 - 2,598 = Tidak Baik(D)

3.49 (87.25%)

IKM

Nilai IKM (TrueScore)

44

Klien Dewasa

Statistik Klien

0

Klien Anak

Statistik Klien

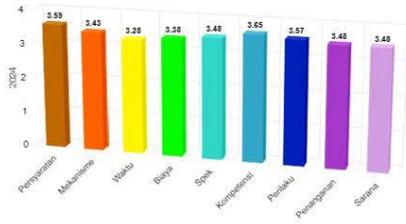
B

Baik

Kategori IKM

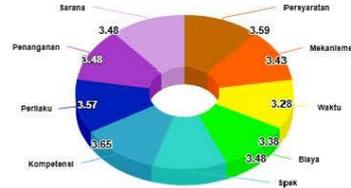
Perbandingan Unsur IKM

2024



Unsur IKM

2024





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/125/II/DE/RH.02.03/2025/BNN Jakarta, 10 Januari 2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) exp
Perihal : Hasil Evaluasi Pemenuhan SNI Target
Wilayah (Reguler) Th. 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

di
Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Direktorat PLRKM) Deputy Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi terhadap lembaga rehabilitasi target wilayah (regular) BNNP/BNNK/Kab pada bulan Desember 2024 dengan target pemenuhan 70 %. Adapun daftar lembaga rehabilitasi yang memenuhi SNI tahun 2024 terlampir dengan e-sertifikat menyusul.
3. Berdasarkan dengan butir dua, dimohon Kepala untuk terus melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas layanan, sehingga tercapai pemenuhan 100% pada tahun 2025.

4. Demikian...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Pimpinan Lembaga Rehabilitasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI TARGET WILAYAH (REGULER)
YANG MEMENUHI SNI 8807:2022 TAHUN 2024

NO	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	JENIS LAYANAN	PROSENTASE
1	2	3	4	5
1	Aceh	Yayasan Al Fatha	Rawat Inap Sosial	83,33
2	Sumatera Utara	Klinik Pratama BNNK Labuhanbatu Utara	Rawat Jalan Medis	88.46
3		RSJ Prof. Dr. M Ildrem	Rawat Inap Medis	94.32
4	Sumatera Selatan	Klinik Pratama BNN Kabupaten Empat Lawang	Rawat Jalan Medis	94.87
5	Sumatera Barat	RSJ Prof HB. Saanin	Rawat Inap Medis	94.32
6	Riau	Yayasan Rumah Solid	Rawat Inap Sosial	80.77
7	Lampung	RSJ Lampung	Rawat Inap Medis	88.64
8	Kepulauan Bangka Belitung	Klinik Pratama BNNK Pangkalpinang	Rawat Jalan Medis	89.74
9	Bengkulu	Klinik Pratama BNNK Bengkulu Selatan	Rawat Jalan Medis	89.74
10	DKI Jakarta	Puskesmas Tanjung Priuk	Rawat Jalan Medis	82.05
11		Klinik Sisma Medikal Warakas	Rawat Jalan Medis	91.03
12	Banten	Yayasan Sahabat (Sakinah Harakah)	Rawat Jalan Sosial	95,16
13	Jawa Barat	Klinik Pratama BNNK Bogor	Rawat Jalan Medis	98,72
14		Klinik Pratama BNNK Tasikmalaya	Rawat Jalan Medis	92.31
15		Klinik Bunda Aulia Jabar	Rawat Jalan Medis	92.31
16		Yayasan Rehab Korban	Rawat Jalan Sosial	90.32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/125/I/DE/RH.02.03/2025/BNN
 TANGGAL : 10 Januari 2025

NO	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	JENIS LAYANAN	PROSENTASE
1	2	3	4	5
		Narkoba Bekasi		
17	Jawa Tengah	Klinik Pratama BNNK Tegal	Rawat Jalan Medis	87.18
18		Klinik Pratama BNNK Purbalingga	Rawat Jalan Medis	96.15
19		Klinik Pratama BNNK Kendal	Rawat Jalan Medis	96.15
20	DI Yogyakarta	Klinik Pratama Wira BNNK Kota Yogyakarta	Rawat Jalan Medis	92.31
21	Jawa Timur	Klinik Pratama Banyak Wide BNN Kab Lumajang	Rawat Jalan Medis	89.74
22		Klinik Pratama Rawat Jalan BNN Kab Sumenep	Rawat Jalan Medis	91.03
23		Ghana Recovery Kab Pamekasan	Rawat Inap Sosial	78.21
24	Kalimantan Utara	Yayasan Sekata Tarakan	Rawat Jalan Sosial	79.03
25	Kalimantan Barat	Yayasan Garatak Sambas	Rawat Inap Sosial	80.77
26	Kalimantan Tengah	RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kapuas	Rawat Jalan Medis	97.44
27	Kalimantan Selatan	Klinik Pratama BNNK Barito Kuala	Rawat Jalan Medis	80.77
28		Klinik Utama Mubarak	Rawat Jalan Medis	74.36
29	Sulawesi Utara	Yayasan Bunda Meifa	Rawat Jalan Sosial	80.65
30		Klinik Pratama BNNK Bitung	Rawat Jalan Medis	84.62
31	Sulawesi Barat	Puskesmas Bambu Mamuju	Rawat Jalan Medis	75.64
32	Sulawesi Selatan	Puskesmas Watampone	Rawat Jalan Medis	70.51
33		Yayasan Prana Waksara	Rawat Jalan Sosial	74,19
34	Bali	Yayasan Anargya Sober	Rawat Inap Sosial	98.72

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/125/I/DE/RH.02.03/2025/BNN
 TANGGAL : 10 Januari 2025

NO	PROVINSI	NAMA LEMBAGA	JENIS LAYANAN	PROSENTASE
1	2	3	4	5
		House Denpasar		
35		Yayasan Satu Nusa Bali	Rawat Inap Sosial	91.03
36	Nusa Tenggara Barat	Yayasan Generasi Metro Bersinar	Rawat Inap Sosial	89.74
37	Gorontalo	Klinik Pratama BNNK Boalemo	Rawat Jalan Medis	94.87
38		Klinik Pratama BNNK Bone Bolango	Rawat Jalan Medis	89.74
39	Papua Barat	RSAL dr. Azhar Zahir Manokwari	Rawat Jalan Medis	71.79



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : **B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN**
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKR,
IKM dan Presentase Peningkatan
Kualitas Hidup Tahun 2024

Jakarta, 07 Januari 2025

Kepada

Yth. **Daftar terlampir**

di
Tempat

1. Rujukan :

- a. **Undang-Undang** Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. **Peraturan Presiden** Nomor 47 Tahun 2019 tentang **Perubahan** atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor **1** Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan **Narkotika Nasional** Provinsi dan Badan Narkotika **Nasional** Kabupaten/Kota;
- e. Surat Perintah Kepala Badan Narkotika **Nasional** Nomor : Sprin/2003/VI/KA/KP. 05.00/2024/BNN tanggal 1 Juni 2024 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Rehabilitasi BNN;
- f. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan **Narkotika Nasional** Tahun Anggaran 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama **ini** disampaikan kepada Kepala bahwa Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah selesai melaksanakan pengukuran **Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR)**, pengukuran **Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi (IKM)** dan Presentase Penerima **Layanan Rehabilitasi** yang mengalami **Peningkatan Kualitas Hidup Tahun 2024**, yang **merupakan** capaian kinerja bidang **Rehabilitasi** dengan hasil sebagaimana terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala untuk dapat menjadikan hasil **dimaksud** sebagai dasar dalam meningkatkan capaian kinerja dan peningkatan **kualitas** bidang **rehabilitasi** mendatang di **wilayah** beserta jajaran.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BS/E), Badan Siber dan Sandi Negara.



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4244/XII/DE/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 9 (sembilan) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi Seluruh Indonesia**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota Seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/273/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama TA. 2024;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/331/III/DE/RH.01.00/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua TA. 2024;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/909/VIII/DE/RH.02.03/2024/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga TA. 2024;
- h. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 418 unit IBM pada bulan Desember 2024. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperoleh data dan informasi capaian program, faktor pendukung serta penghambat implementasi program IBM sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di tahun anggaran 2025.
3. Hasil evaluasi operasionalisasi unit IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Capaian fase perkembangan unit IBM

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota serta telaah bukti dukung pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM, diperoleh capaian fase perkembangan unit IBM sebagai berikut:

- Sebanyak 99 unit IBM (23,68%) memenuhi indikator fase Prima
- Sebanyak 221 unit IBM (52,97%) memenuhi indikator fase Tangguh
- Sebanyak 49 unit IBM (11,72%) memenuhi indikator fase Berkembang
- Sebanyak 32 unit IBM (7,66%) memenuhi indikator fase Tumbuh
- Sebanyak 15 unit IBM (3,59%) memenuhi indikator fase Rintisan
- Sebanyak 2 unit (0,48%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 401 unit (95,93%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh, dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi, Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), serta AP telah dapat menemu kenali dan berhasil menjangkau klien untuk dilakukan skrining dengan menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya kemudian klien diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan IBM

Kegiatan IBM adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh AP di luar kegiatan layanan pemulihan, meliputi sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan. Idealnya, kegiatan IBM dilakukan pada awal program dengan melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami manfaat dan memberikan kontribusi dalam memajukan program IBM. AP dalam melakukan kegiatan IBM senantiasa memerlukan pendampingan intensif dari petugas BNNP & BNNK/ Kota. Dari hasil evaluasi di Tahun 2024 ini AP telah melakukan sosialisasi IBM sebanyak 3.277 kali kepada 73.749 audiens, pemetaan 1.330 kali, dan penjangkauan dilakukan kepada 3.073 orang.

c. Gambaran layanan IBM

Layanan intervensi IBM adalah rangkaian kegiatan yang diberikan oleh AP kepada klien IBM mulai dari skrining, penerimaan awal, layanan intervensi wajib dan pilihan serta layanan bina lanjut. Layanan IBM diberikan oleh AP kepada klien tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan petugas BNNP & BNNK/ Kota secara komprehensif serta keterlibatan keluarga dan/ atau orang terdekat dalam upaya pemulihan dan pemantauan terhadap klien. Pada Tahun 2024 tercatat keterlibatan anggota keluarga/ orang terdekat dalam layanan IBM sejumlah 1.819 orang yang terdiri dari orang tua, kakak, adik, suami/ istri, paman/ bibi atau guru sebagai wali murid di sekolah, walaupun terdapat beberapa klien IBM yang memilih untuk tidak melibatkan keluarga dengan alasan takut, malu, ataupun berdomisili jauh dari keluarga.

d. Gambaran profil klien IBM

Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2024 sebanyak 2.310 orang dengan profil berikut:

- Mayoritas klien merupakan hasil penjangkauan AP yaitu 98,40% (2.273 orang)
- Sebanyak 93,90% (2.169 orang) klien berjenis kelamin laki-laki, dan kebanyakan dalam kelompok usia 17-25 tahun (38,01%) dan 26-35 tahun (26,36%)

- 4 -

- Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (53,12%), mayoritas bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan/ pekebun (35,19%) dan pelajar/ mahasiswa (25,19%)
- Jenis zat yang paling banyak disalahgunakan adalah shabu (34,88%), sedatif/ hipnotik (9,71%) dan kanabis (8,70%)

e. Gambaran Agen Pemulihan

Agen Pemulihan (AP) merupakan anggota masyarakat yang tinggal di desa/ kelurahan yang dipilih oleh Kepala Desa/ Lurah untuk melaksanakan kegiatan dan layanan IBM setelah mendapatkan pembekalan sebagai mitra kerja BNN. AP yang ditunjuk biasanya merupakan orang-orang yang aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan desa/ kelurahan, sehingga telah memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Jumlah AP pada tahun 2024 ini terlapor sebanyak 2.210 orang, dengan berbagai latar belakang unsur masyarakat yang berbeda-beda, mayoritas adalah laki-laki dan berasal dari unsur tokoh masyarakat (29,50%).

f. Gambaran pendanaan mandiri untuk IBM

Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 115 unit IBM (27,51%) telah memperoleh pendanaan mandiri untuk operasional unit IBM serta pelaksanaan kegiatan & layanan. Pendanaan mandiri ini merupakan hasil sosialisasi, koordinasi dan advokasi yang dilakukan oleh AP dengan pendampingan serta pembinaan penuh petugas BNNP & BNNK/Kota. Dukungan dana diperoleh dari desa, kelurahan, OPD, iuran/ sumbangan/ donasi, dan/ atau CSR dengan rentang nilai mulai dari Rp 875.000,- sampai dengan Rp 172.133.000,-.

g. Hasil survey kebermanfaatan program IBM terhadap lingkungan & Masyarakat

Dalam rangka mengetahui dampak kegiatan IBM serta kebermanfaatannya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat melalui petugas BNNP & BNNK/Kota melakukan survey berupa penyebaran pengisian kuesioner dengan menggunakan skala *likert* pemberian skor 0-4.

survey di lakukan terhadap 4.111 orang responden yang merupakan anggota masyarakat non AP di wilayah desa/ kelurahan. Mayoritas responden berada dalam kelompok usia 36-45 tahun (27,66%), merupakan warga masyarakat yang berdomisili di sekitar lokasi IBM (72,39%). Berdasarkan hasil survey yang telah di lakukan tercatat bahwa mayoritas responden (92,36%) telah mengetahui keberadaan IBM di wilayah tempat tinggalnya. Selain itu, dari pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 0-4 yang berarti bahwa IBM dapat memberikan dampak sangat positif dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

h. Identifikasi faktor pendukung & penghambat implementasi program IBM

Berdasarkan hasil evaluasi terdapat faktor pendukung keberhasilan program IBM yang harus ditingkatkan, dan faktor penghambat yang harus ditindaklanjuti agar dapat diatasi. beberapa faktor pendukung & faktor penghambat yang dikategorikan sesuai dengan pelaksana program IBM, diantaranya adalah:

- Petugas pendamping IBM di BNNP & BNNK/ Kota
- Agen Pemulihan (AP)
- Kepala Desa/ Lurah

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota atas implementasi program IBM tahun 2024. Diharapkan kinerja pada tahun 2024 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) di IBM dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN
PENGUKURAN IKM DAN IKR T.A 2024**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

HASIL CAPAIAN KINERJA BIDANG REHABILITASI

TAHUN 2024

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
BNN	3.51	3.62	85.32
Aceh	3.32	3.6	90.32
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3.27	3.51	89.53
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	3.26	3.85	83.13
BNN Kabupaten Bireuen	3.70	3.62	96.71
BNN Kabupaten Gayo Lues	3.65	3.52	100.00
BNN Kabupaten Pidie	3.36	3.44	95.83
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3.28	3.62	93.42
BNN Kota Banda Aceh	3.35	3.68	91.67
BNN Kota Langsa	3.11	3.84	97.14
BNN Kota Lhokseumawe	3.56	3.3	94.05
BNN Kota Sabang	2.59	3.65	88.64
BNNP Aceh	3.35	3.43	81.32
Sumatera Utara	3.50	3.58	92.43
BNN Kabupaten Asahan	3.58	3.66	98.31
BNN Kabupaten Batu Bara	4.00	3.81	98.81
BNN Kabupaten Deli Serdang	3.9	3.73	78.82
BNN Kabupaten Karo	3.66	3.68	91.67
BNN Kabupaten Labuhanbatu Utara	2.51	3.27	97.92
BNN Kabupaten Langkat	3.49	3.29	79.21
BNN Kabupaten Mandailing Natal	4	3.57	98.44
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	2.78	3.52	97.92
BNN Kabupaten Simalungun	3.4	3.53	100.00
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2.93	3.47	93.48
BNN Kota Binjai	3.8	3.6	84.21
BNN Kota Gunungsitoli	2.65	3.59	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3.86	3.85	95.74
BNN Kota Tanjung Balai	3.61	3.8	84.26
BNN Kota Tebing Tinggi	3.9	3.62	97.39
BNNP Sumatera Utara	3.57	3.68	96.04
Sumatera Barat	3.76	3.5	83.80
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3.86	3.27	88.64
BNN Kabupaten Solok	3.85	3.52	87.50
BNN Kota Payakumbuh	3.9	3.6	75.78
BNN Kota Sawahlunto	3.35	3.49	86.90

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/47/II/DE/RH.02/2025/BNN
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNNP Sumatera Barat	3.85	3.48	83.56
Riau	3.21	3.69	88.55
BNN Kabupaten Kuantan Singingj	3.49	3.77	94.32
BNN Kabupaten Pelalawan	3.01	3.63	80.92
BNN Kota Dumai	2.73	3.66	85.53
BNN Kota Pekanbaru	3.28	3.58	95.00
BNNP Riau	3.53	3.79	90.32
Kepulauan Riau	3.66	3.72	80.21
BNN Kabupaten Tanjung Balaj Karimun	3.19	3.75	98.15
BNN Kota Batam	3.77	3.55	85.71
BNN Kota Tanjung Pinang	3.7	3.71	83.75
BNNP Kepulauan Riau	3.66	3.8	72.73
Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.57	91.56
BNN Kabupaten Bangka	3.52	3.47	94.12
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3.55	3.33	91.25
BNN Kabupaten Belitung	3.9	3.83	98.39
BNN Kota Pangkal Pinang	3.69	3.66	97.09
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3.67	3.58	73.28
Bengkulu	3.68	3.69	78.42
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3.21	3.69	89.63
BNN Kota Bengkulu	3.6	3.62	76.32
BNNP Bengkulu	4.00	3.86	77.13
Jambi	3.24	3.48	85.14
BNN Kabupaten Batang Hari	3.59	3.43	84.68
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	2.75	3.67	97.00
BNN Kota Jambi	2.71	3.3	85.89
BNNP Jambi	3.90	3.79	81.46
Sumatera Selatan	3.19	3.63	86.63
BNN Kabupaten Empat Lawang	2.61	3.32	91.94
BNN Kabupaten Muara Enim	3.17	3.77	78.75
BNN Kabupaten Musj Rawas	2.88	3.72	100.00
BNN Kabupaten Ogan Ilir	2.26	3.64	82.50
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3.81	3.89	97.97
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2.97	3.5	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	4	3.79	81.45
BNN Kota Pagar Alam	3.03	3.39	94.23
BNN Kota Prabumulih	3.13	3.61	75.69
BNNP Sumatera Selatan	3.7	3.73	83.44
Lampung	3.6	3.65	83.85
BNN Kabupaten Lampung Selatan	2.39	3.82	76.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3.9	3.66	74.52

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Tanggamus	3.66	3.68	83.33
BNN Kabupaten Way Kanan	3.9	3.45	98.57
BNN Kota Metro	3.9	3.56	88.69
BNNP Lampung	4	3.7	87.18
Banten	3.93	3.57	76.30
BNN Kota Cilegon	4.00	3.82	65.63
BNN Kota Tangerang	3.86	3.59	88.69
BNN Kota Tangerang Selatan	3.86	3.44	77.42
BNNP Banten	4.00	3.52	68.42
DKI Jakarta	3.84	3.65	89.79
BNN Kota Jakarta Selatan	3.91	3.72	75.24
BNN Kota Jakarta Timur	4.00	3.54	92.11
BNN Kota Jakarta Utara	3.63	3.84	99.48
BNNP DKI Jakarta	4.00	3.45	90.05
Jawa Barat	3.56	3.56	80.20
BNN Kabupaten Bandung Barat	3.46	3.44	74.22
BNN Kabupaten Bogor	3.20	3.54	88.31
BNN Kabupaten Ciamis	4.00	3.58	82.64
BNN Kabupaten Cianjur	3.76	3.6	71.88
BNN Kabupaten Garut	3.73	3.86	93.64
BNN Kabupaten Karawang	3.86	3.85	94.32
BNN Kabupaten Kuningan	3.38	3.3	93.27
BNN Kabupaten Sukabumi	3.11	3.28	48.75
BNN Kabupaten Sumedang	3.57	3.47	70.00
BNN Kota Bandung	3.31	3.52	63.69
BNN Kota Cimahi	3.72	3.64	86.23
BNN Kota Cirebon	3.56	3.57	82.69
BNN Kota Depok	3.17	3.5	88.28
BNN Kota Tasikmalaya	3.57	3.59	88.54
BNNP Jawa Barat	3.62	3.53	75.78
Jawa Tengah	3.70	3.62	85.40
BNN Kabupaten Banyumas	3.75	3.9	90.15
BNN Kabupaten Batang	3.61	3.65	89.19
BNN Kabupaten Cilacap	3.62	3.43	98.53
BNN Kabupaten Kendal	3.49	3.53	90.00
BNN Kabupaten Magelang	3.53	3.52	87.10
BNN Kabupaten Purbalingga	3.49	3.57	76.85
BNN Kabupaten Temanggung	4.00	3.82	98.75
BNN Kota Surakarta	3.90	3.53	84.85
BNN Kota Tegal	3.63	3.41	85.19
BNNP Jawa Tengah	4.00	3.7	68.40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/471/DE/RH.02/2025/BNN
 TANGGAL : 07 Januari 2025

D.I.Yogyakarta	3.74	3.83	87.64
BNN Kabupaten Bantul	4.00	3.84	86.27
BNN Kabupaten Sleman	4.00	3.87	91.42
BNN Kota Yogyakarta	2.94	3.82	81.25
BNNP D.I.Yogyakarta	4.00	3.79	87.38
Jawa Timur	3.66	3.6	87.46
BNN Kabupaten Blitar	4.00	3.4	80.26
BNN Kabupaten Gresik	4.00	3.75	86.90
BNN Kabupaten Kediri	3.32	3.36	97.28
BNN Kabupaten Lumajang	3.39	3.62	83.82
BNN Kabupaten Malang	3.70	3.53	82.81
BNN Kabupaten Nganjuk	3.49	3.56	91.67
BNN Kabupaten Pasuruan	3.27	3.21	97.50
BNN Kabupaten Sidoarjo	3.80	3.89	92.50
BNN Kabupaten Sumenep	2.93	3.37	79.17
BNN Kabupaten Trenggeng	3.99	3.57	91.67
BNN Kabupaten Tuban	3.90	3.6	87.93
BNN Kabupaten Tulungagung	3.28	3.62	77.78
BNN Kota Batu	4.00	3.73	96.59
BNN Kota Kediri	3.62	3.45	71.88
BNN Kota Malang	4.00	3.87	78.70
BNN Kota Mojokerto	3.70	3.74	83.65
BNN Kota Surabaya	3.76	3.46	85.37
BNNP Jawa Timur	3.81	3.87	96.54
Kalimantan Barat	3.23	3.57	88.79
BNN Kabupaten Bengkayang	3.79	3.56	86.84
BNN Kabupaten Kubu Raya	3.35	3.74	79.81
BNN Kabupaten Mempawah	3.9	3.89	95.83
BNN Kabupaten Sanggau	2.34	3.42	90.48
BNN Kabupaten Sintang	2.89	3.67	95.19
BNN Kota Pontianak	3.7	3.73	96.53
BNN Kota Singkawang	2.61	3.43	86.36
BNNP Kalimantan Barat	3.25	3.49	80.63
Kalimantan Selatan	3.43	3.68	90.69
BNN Kabupaten Balangan	3.43	3.56	94.32
BNN Kabupaten Barito Kuala	3.45	3.63	97.78
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	3.17	3.62	75.00
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3.65	3.73	98.61
BNN Kabupaten Tabalong	3.86	3.74	93.75
BNN Kabupaten Tanah Laut	2.71	3.8	56.41
BNN Kota Banjarbaru	4	3.79	84.92

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/471/DE/RH.02/2025/BNN
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kota Banjarmasin	2.91	3.66	97.79
BNNP Kalimantan Selatan	3.7	3.68	99.55
Kalimantan Tengah	3.95	3.7	79.64
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3.86	3.69	81.06
BNN Kota Palangkaraya	4	3.71	75.64
BNNP Kalimantan Tengah	4	3.7	81.01
Kalimantan Timur	3.73	3.7	84.05
BNN Kota Balikpapan	3.38	3.65	80.85
BNN Kota Bontang	3.39	3.36	78.85
BNN Kota Samarinda	3.91	3.8	87.50
BNNP Kalimantan Timur	3.99	3.75	82.03
Kalimantan Utara	3.83	3.47	94.66
BNN Kabupaten Nunukan	4	3.56	91.67
BNN Kota Tarakan	3.59	3.36	97.09
BNNP Kalimantan Utara	3.91	3.6	93.00
Bali	3.72	3.65	91.18
BNN Kabupaten Badung	3.89	3.68	65.28
BNN Kabupaten Buleleng	3.86	3.46	100.00
BNN Kabupaten Gianyar	3.61	3.31	70.45
BNN Kabupaten Karangasem	3.32	3.56	100.00
BNN Kabupaten Klungkung	3.86	3.94	95.00
BNN Kota Denpasar	3.62	3.61	84.26
BNNP Bali	3.90	3.84	93.06
Nusa Tenggara Barat	3.92	3.72	83.95
BNN Kabupaten Bima	4	3.61	82.81
BNN Kabupaten Sumbawa	3.9	3.69	86.67
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3.69	3.65	83.75
BNN Kota Mataram	4.00	3.81	85.80
BNNP Nusa Tenggara Barat	4.00	3.75	80.59
Nusa Tenggara Timur	3.26	3.77	87.18
BNN Kabupaten Belu	3.18	3.8	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3.66	3.91	100.00
BNN Kota Kupang	2.54	3.55	100.00
BNNP Nusa Tenggara Timur	3.67	3.79	80.77
Sulawesi Utara	3.18	3.59	92.83
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3.76	3.82	100.00
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	2.79	3.9	89.17
BNN Kota Bitung	3.11	3.63	93.57
BNN Kota Manado	2.85	3.74	90.82
BNNP Sulawesi Utara	3.37	3.4	93.27
Gorontalo	3.2	3.5	77.17

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
 SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
 NOMOR : B/471/DE/RH.02/2025/BNN
 TANGGAL : 07 Januari 2025

BNN Kabupaten Boalemo	3.41	3.25	93.75
BNN Kabupaten Bone Bolango	3.07	3.64	71.88
BNN Kabupaten Gorontalo	3.23	3.57	58.33
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	2.77	3.24	87.50
BNN Kota Gorontalo	2.85	3.49	75.00
BNNP Gorontalo	3.90	3.54	78.13
Sulawesi Barat	3.50	3.52	97.22
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3.53	3.36	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3.47	3.59	96.67
Sulawesi Selatan	3.81	3.65	87.56
BNN Kabupaten Bone	4	3.89	95.44
BNN Kabupaten Tana Toraja	3.79	3.46	72.58
BNN Kota Palopo	3.57	3.51	77.30
BNNP Sulawesi Selatan	3.67	3.54	89.72
Sulawesi Tengah	2.94	3.6	75.83
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	3.46	3.24	25.00
BNN Kabupaten Donggala	2.84	3.68	81.48
BNN Kabupaten Morowali	1.89		92.86
BNN Kabupaten Poso	2.22	3.64	71.00
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	4	3.72	95.51
BNN Kota Palu	3.37	3.84	63.28
BNNP Sulawesi Tengah	2.78	3.34	72.97
Sulawesi Tenggara	3.47	3.54	92.14
BNN Kabupaten Kolaka	3.6	3.63	99.07
BNN Kabupaten Muna	3.62	3.4	99.09
BNN Kota Baubau	2.24	3.64	93.75
BNN Kota Kendari	3.89	3.59	67.86
BNNP Sulawesi Tenggara	3.99	3.53	89.44
Maluku	3.23	3.22	72.00
BNN Kabupaten Buru Selatan	3.27	3.47	75.00
BNN Kota Tual	2.79	3.4	47.22
BNNP Maluku	3.62	3.22	79.35
Maluku Utara	3.08	3.39	74.64
BNN Kabupaten Halmahera Utara	2.25	3.39	95.00
BNN Kabupaten Pulau Morotai	3.09	3.25	76.67
BNN Kota Tidore Kepulauan	3.32	3.45	100.00
BNNP Maluku Utara	3.66	3.41	69.57
Papua	3.29	3.68	97.47
BNN Kabupaten Jayapura	3.59	3.85	95.24
BNN Kabupaten Mimika	3.01	3.42	93.75
BNNP Papua	3.28	3.65	99.46

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT Plt. Deputi Rehabilitasi
NOMOR : B/47/I/DE/RH.02/2025/BNN
TANGGAL : 07 Januari 2025

Papua Barat	3.66	3.64	100.00
Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido	4	3.64	76.99
Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	4	3.63	83.11
Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	4	3.65	67.97
Loka Rehabilitasi BNN Batam	4	3.76	85.76
Loka Rehabilitasi BNN Deli Serdang	3.81	3.64	89.25
Loka Rehabilitasi BNN Kalianda	4	3.69	63.69



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

[Download Excel](#)Tampilkan entriCari:

No. ↑↓	Kode Satuan Kerja ↑↓	Satuan Kerja ↑↓	NK Perencanaan Anggaran ↑↓	NK Pelaksanaan Anggaran ↑↓	Nilai Kinerja Anggaran ↑↓
1	682630	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	98,21	97,98	98,10

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

[Sebelumnya](#) [1](#) [Selanjutnya](#)



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output					
1	042	066	682630	BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT	Nilai	100.00	88.59	99.90	100.00	100.00	98.65	99.38	97.98	100%	0.00	97.98	
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.29	19.98	10.00	10.00	9.87	24.84					
					Nilai Aspek	94.30			99.64			99.38					



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1
Perihal : Penyampaian Capaian Indikator
Kinerja Nilai Zona Integritas
Berdasarkan Penilaian Internal Pada
BNNP Tahun 2024

Jakarta, 30 Desember 2024

Kepada

Yth. **Para Kepala BNNP**

di
tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, capaian indikator kinerja kegiatan Nilai Zona Integritas berdasarkan penilaian internal untuk BNNP Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

3. Berdasarkan dengan butir dua, diperintahkan kepada Kepala BNNP agar terus meningkatkan kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja dan

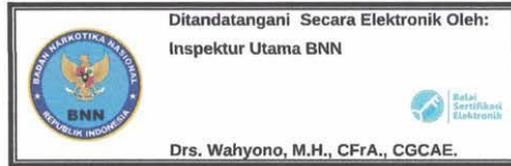
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

menjadikan capaian tahun 2024 sebagai acuan penentuan target kinerja pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BNNP Tahun 2025.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan dilaksanakan.



Tembusan :
Sekretaris Utama BNN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

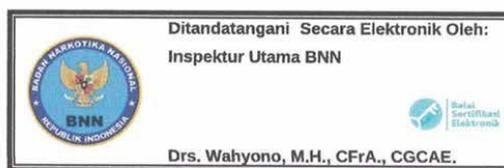
**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
NILAI ZONA INTEGRITAS BERDASARKAN
PENILAIAN INTERNAL PADA BNNP TAHUN 2024**

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
1	BNNP Daerah Istimewa Yogyakarta	55.51	36.43	91.94
2	BNNP Jawa Timur	53.21	34.98	88.19
3	BNNP Nusa Tenggara Barat	51.47	36.59	88.06
4	BNNP Sumatera Selatan	51.24	36.26	87.50
5	BNNP Sulawesi Selatan	49.82	36.90	86.72
6	BNNP Jawa Tengah	51.31	34.97	86.28
7	BNNP Bali	49.75	36.52	86.27
8	BNNP Kalimantan Selatan	50.66	34.86	85.52
9	BNNP Kalimantan Tengah	49.97	35.03	85.00
10	BNNP Lampung	50.42	34.53	84.95
11	BNNP Sumatera Barat	51.49	31.83	83.32
12	BNNP Banten	47.17	35.92	83.09
13	BNNP Jawa Barat	48.79	34.24	83.03
14	BNNP Sulawesi Barat	46.53	34.53	81.06
15	BNNP Kepulauan Riau	43.82	36.63	80.45
16	BNNP Sumatera Utara	45.59	34.44	80.03
17	BNNP Papua Barat	45.32	34.48	79.80
18	BNNP Kalimantan Timur	43.10	36.34	79.44
19	BNNP Riau	41.80	34.04	75.84
20	BNNP Maluku	43.62	32.05	75.67
21	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	39.30	35.99	75.29
22	BNNP Kalimantan Barat	40.72	34.33	75.05
23	BNNP Sulawesi Tenggara	41.54	33.50	75.04
24	BNNP DKI Jakarta	41.77	33.26	75.03
25	BNNP Aceh	41.74	33.28	75.02
26	BNNP Sulawesi Utara	31.94	36.87	68.81

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

LAMPIRAN
SURAT Inspektur Utama BNN
NOMOR : B/658/XII/IR/IR.04.05/2024/INS
TANGGAL : 30 Desember 2024

No.	Nama Satuan Kerja	Hasil Penilaian TPI		
		Pengungkit	Hasil	Jumlah
27	BNNP Jambi	32.60	35.97	68.57
28	BNNP Nusa Tenggara Timur	32.72	35.49	68.21
29	BNNP Kalimantan Utara	32.25	35.62	67.87
30	BNNP Bengkulu	43.83	22.50	66.33
31	BNNP Gorontalo	29.66	34.38	64.04
32	BNNP Maluku Utara	37.63	16.88	54.51
33	BNNP Papua	35.60	17.00	52.60
34	BNNP Sulawesi Tengah	31.25	1.25	32.50



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

